



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang mempunyai nilai tambah sesuai dengan tujuan Badan Narkotika Nasional, perlu digambarkan peta proses bisnis hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*) sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga implementasi proses bisnis pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Tata Laksana (*Business Process*) perlu dicabut dengan implementasi Peraturan terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Peta Proses Bisnis;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pemerintah melaksanakan penyusunan peta proses bisnis untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien.

- (2) penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- (3) penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2

- (1) Peta proses bisnis disusun berdasarkan tugas dan fungsi pada unit organisasi di Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Tata Laksana (*Business Process*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

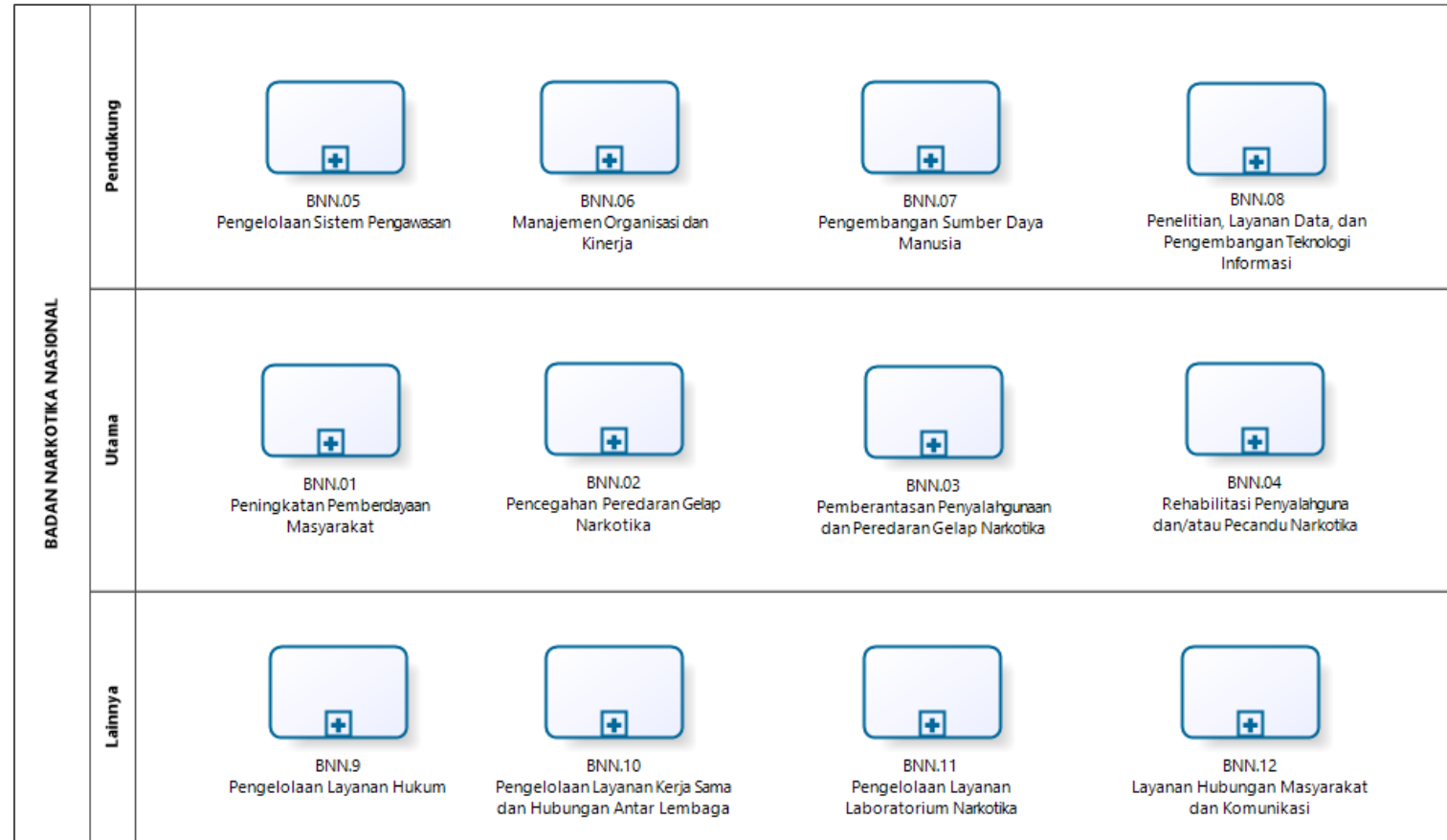
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

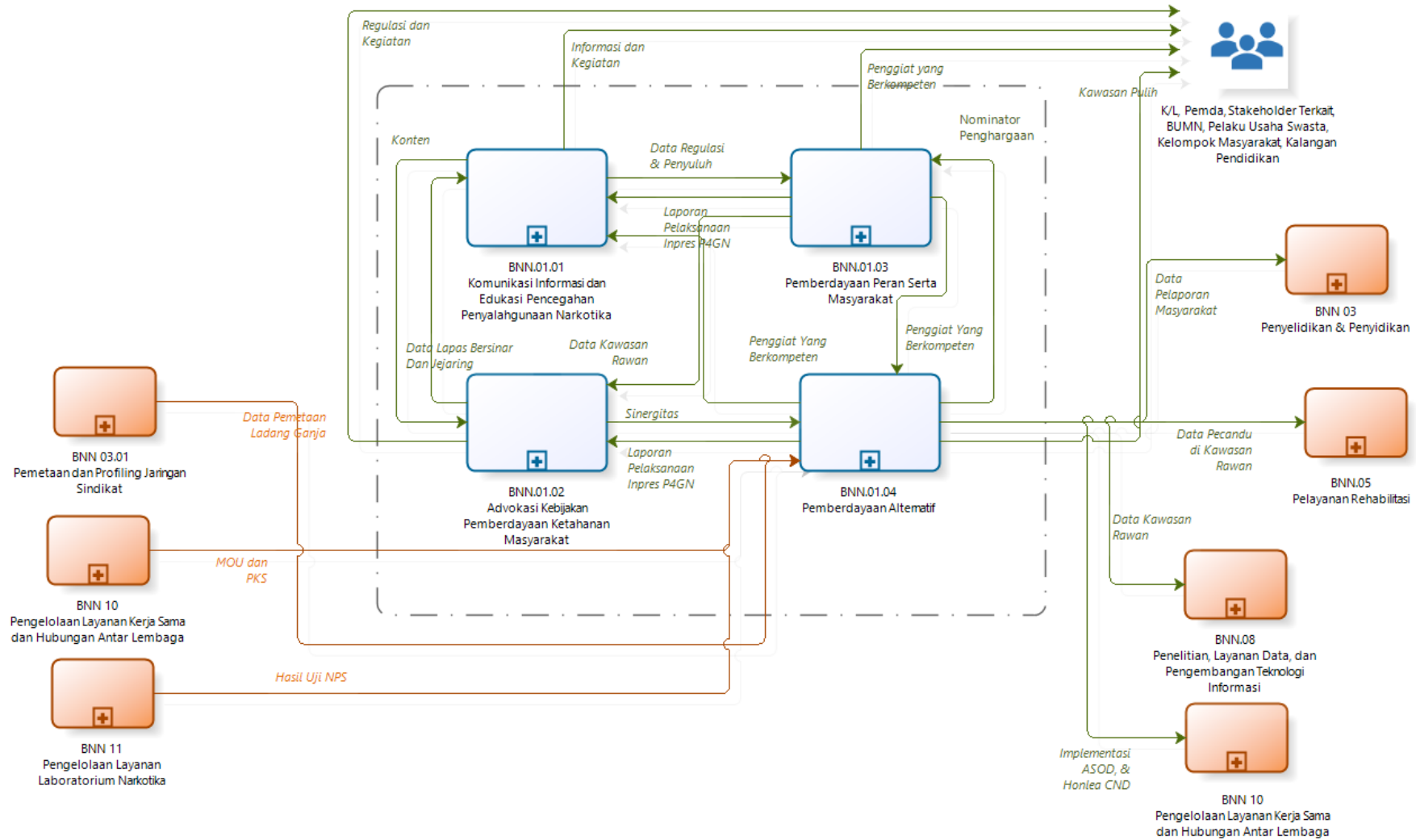
TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL

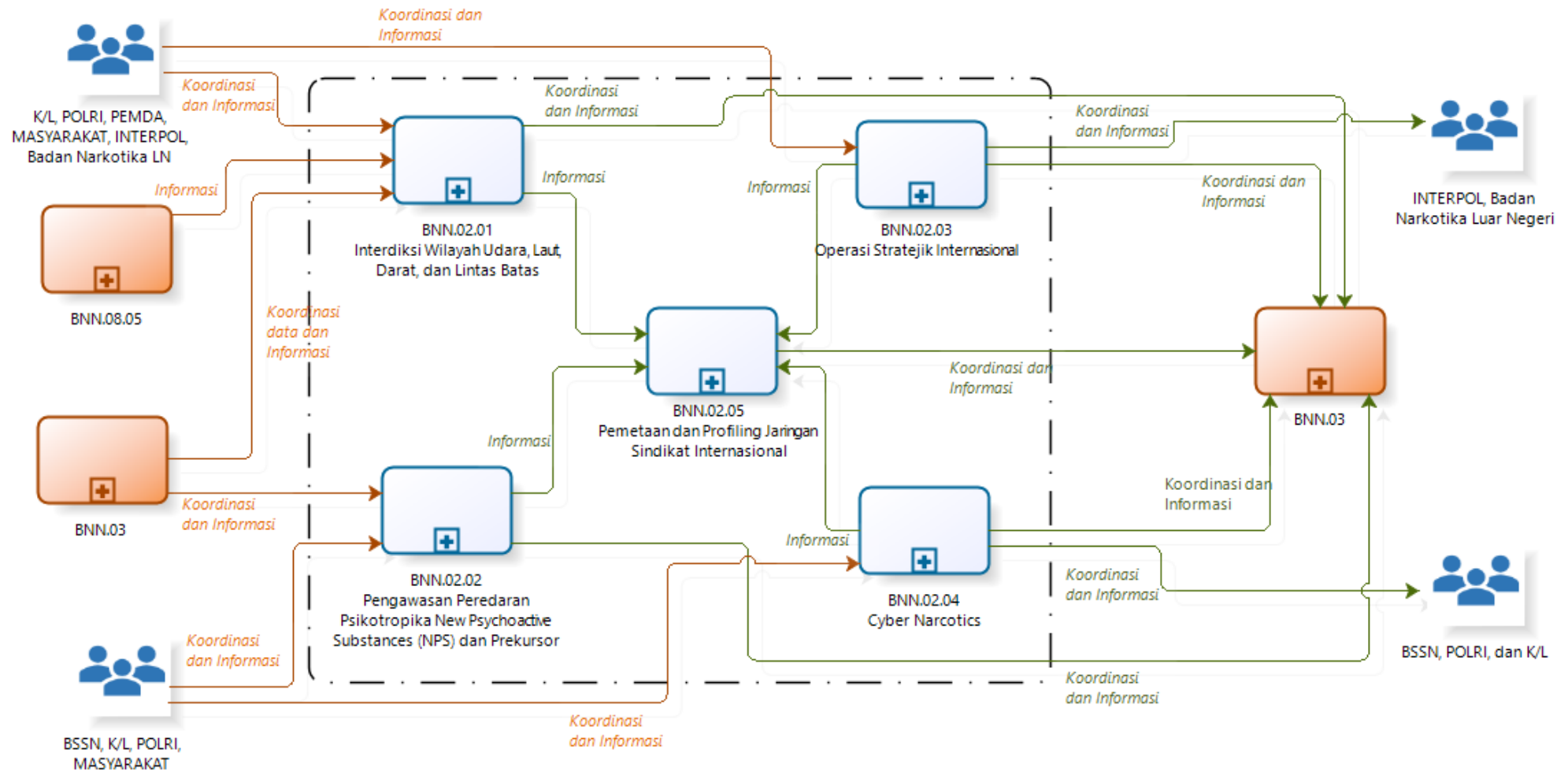


Gambar 1. Proses Bisnis Level 0 BNN

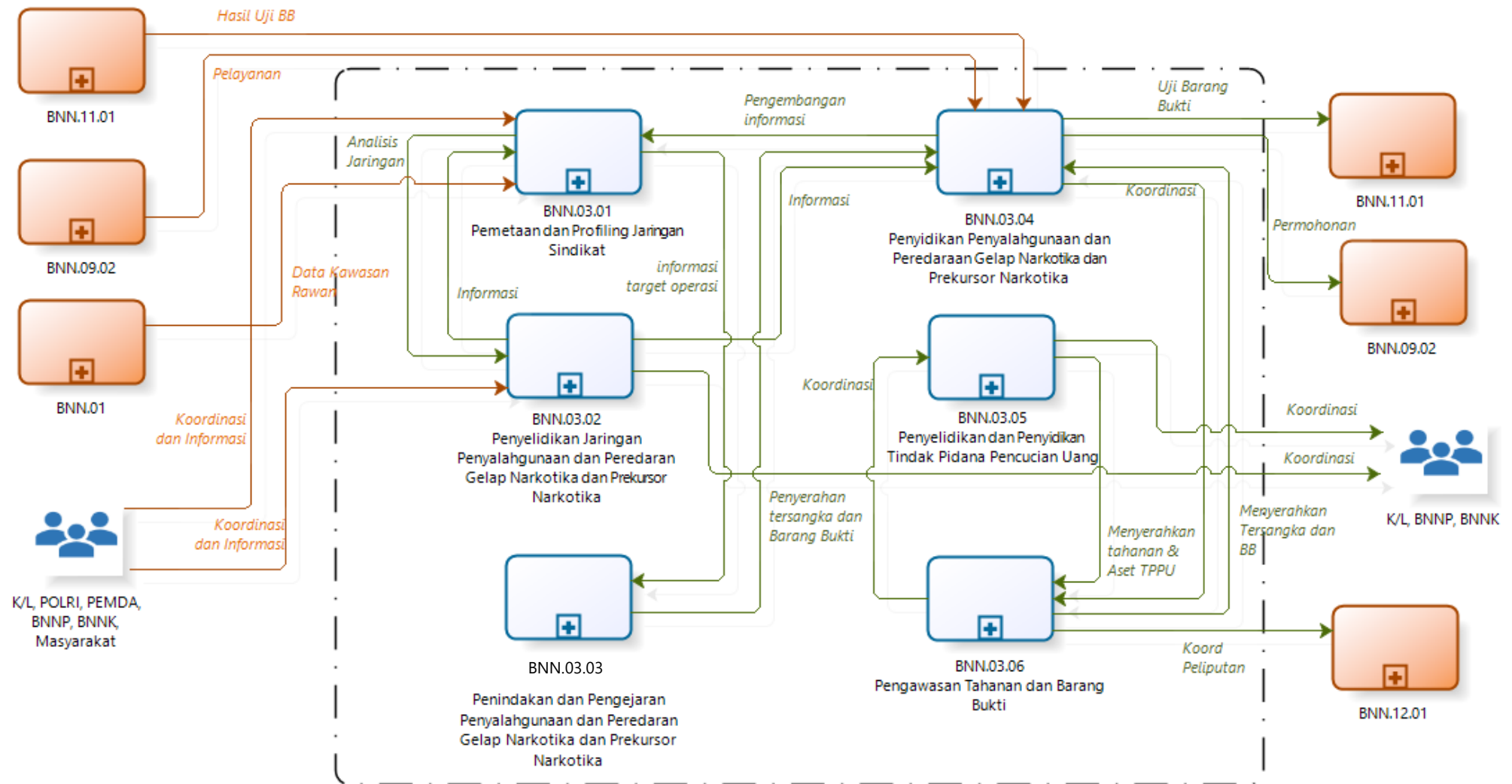
A. PROSES BISNIS LEVEL 1 BNN



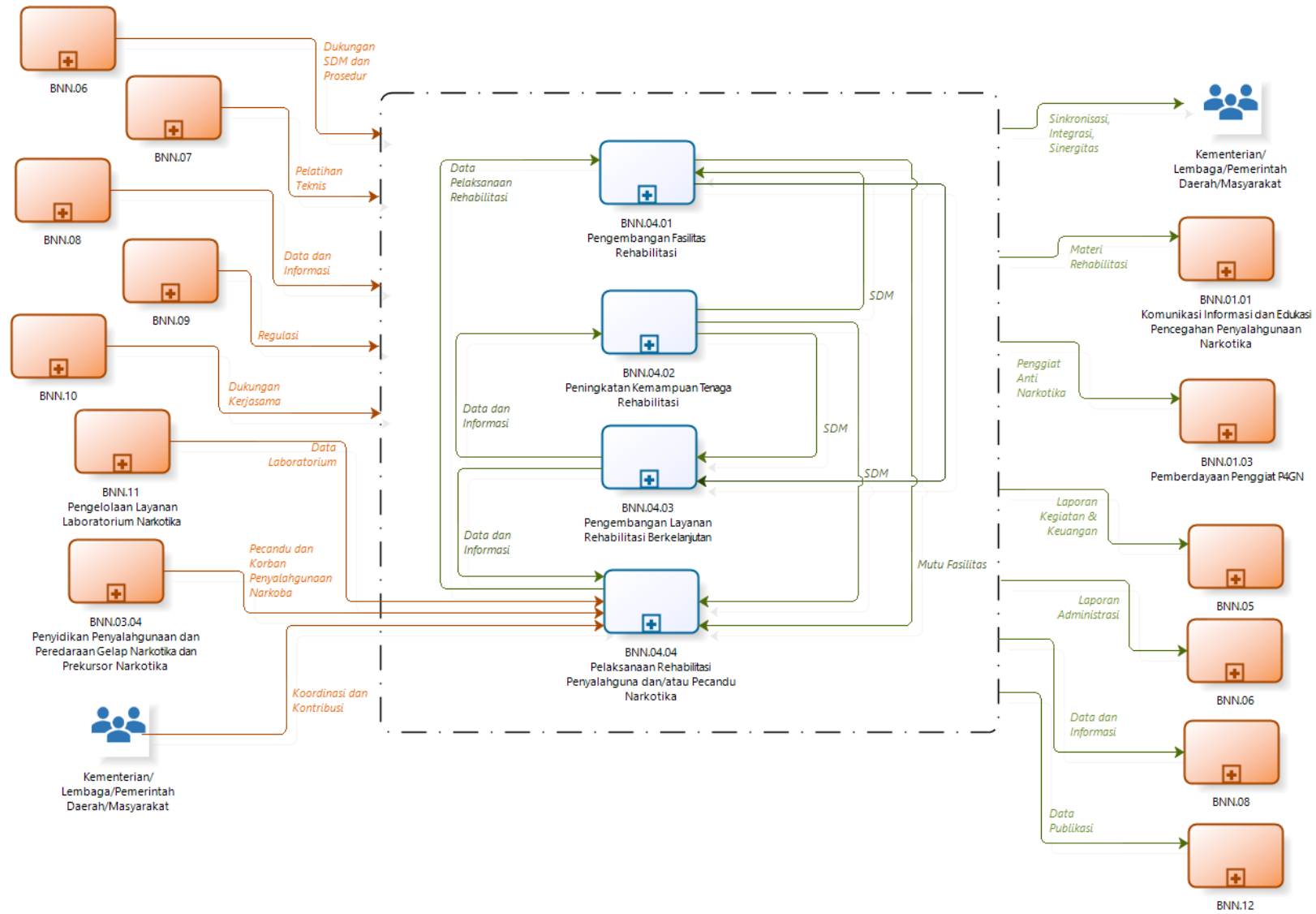
Gambar 2. BNN.01 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat



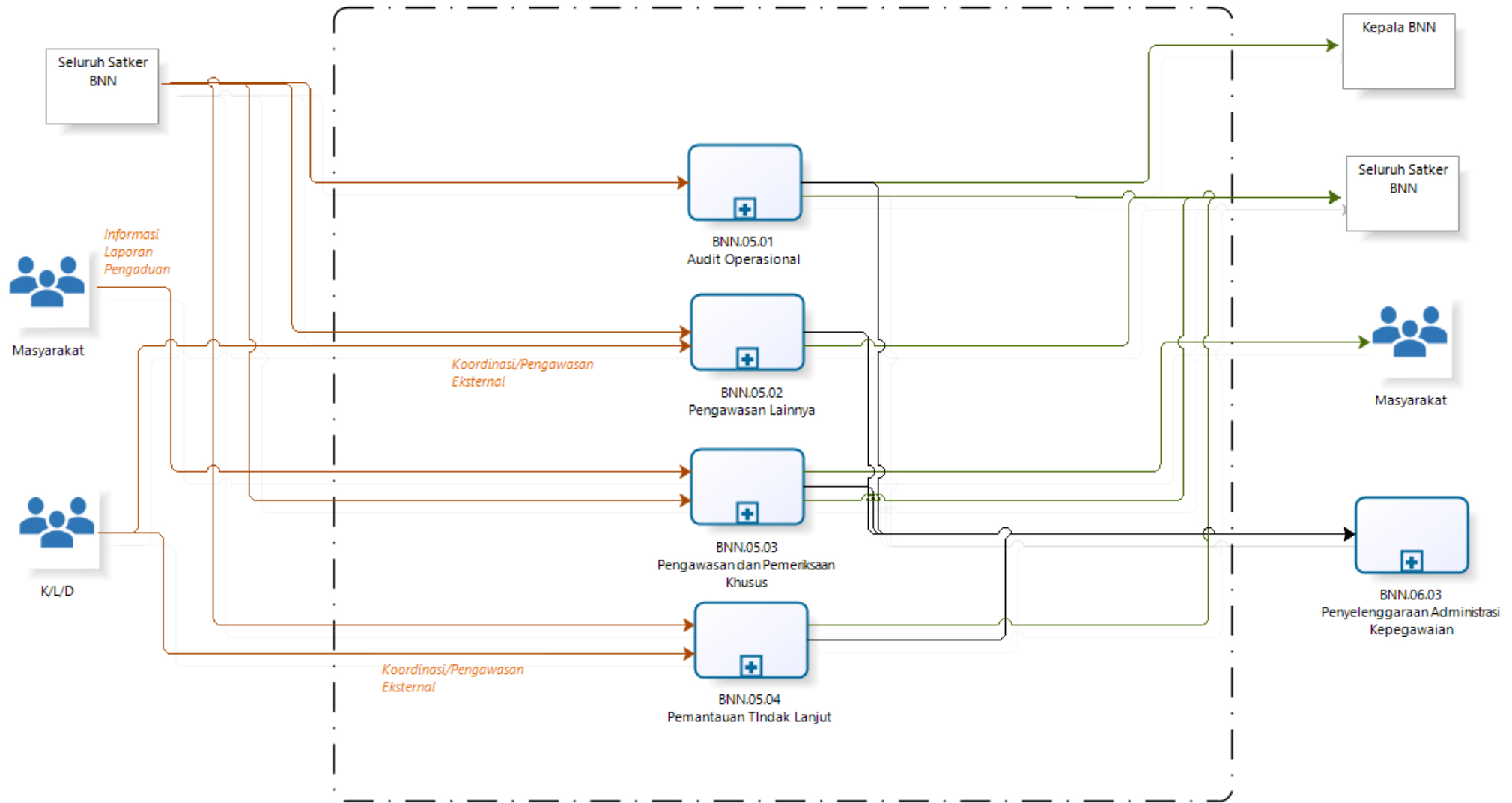
Gambar 3. BNN.02 Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika



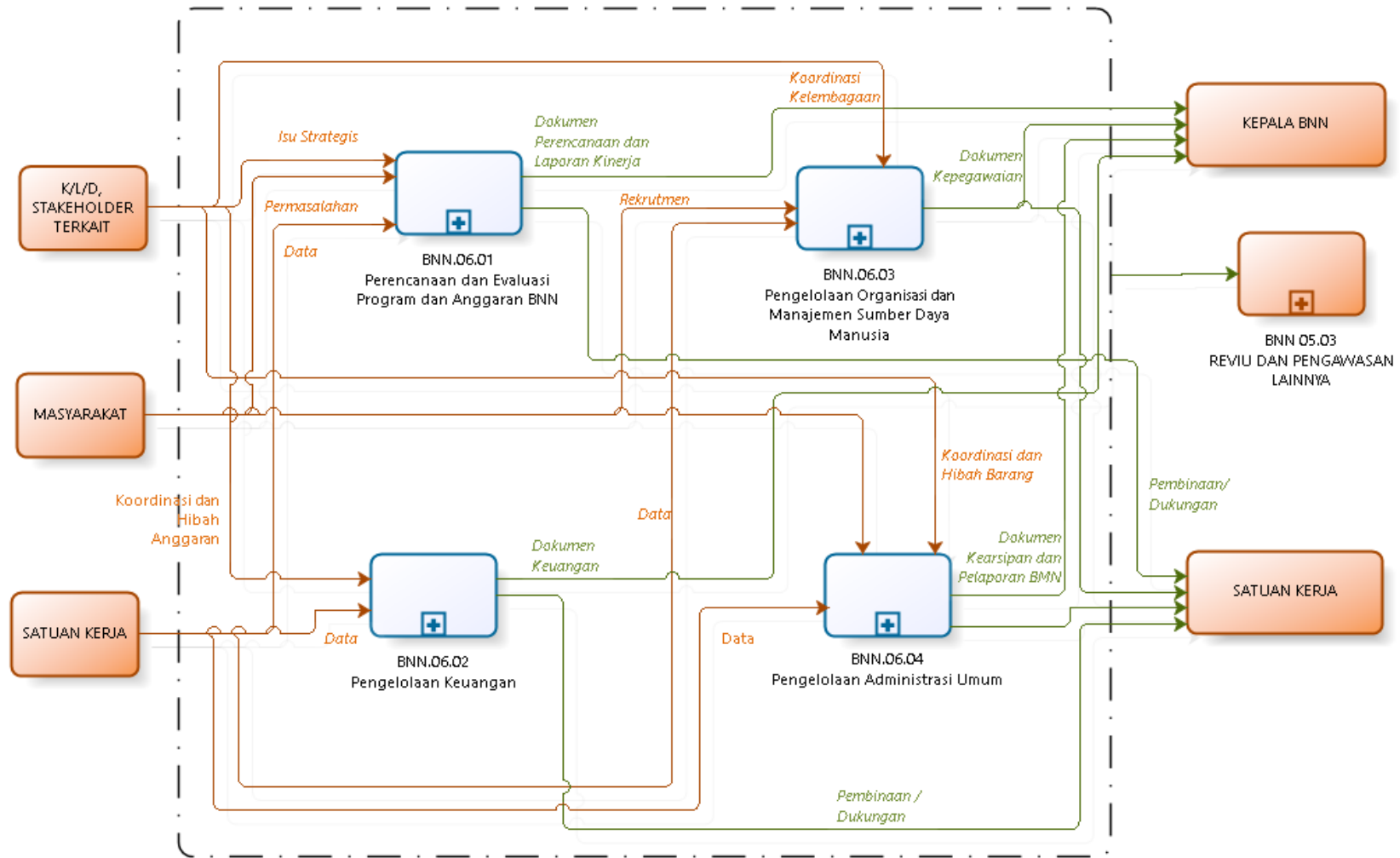
Gambar 4. BNN.03 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika



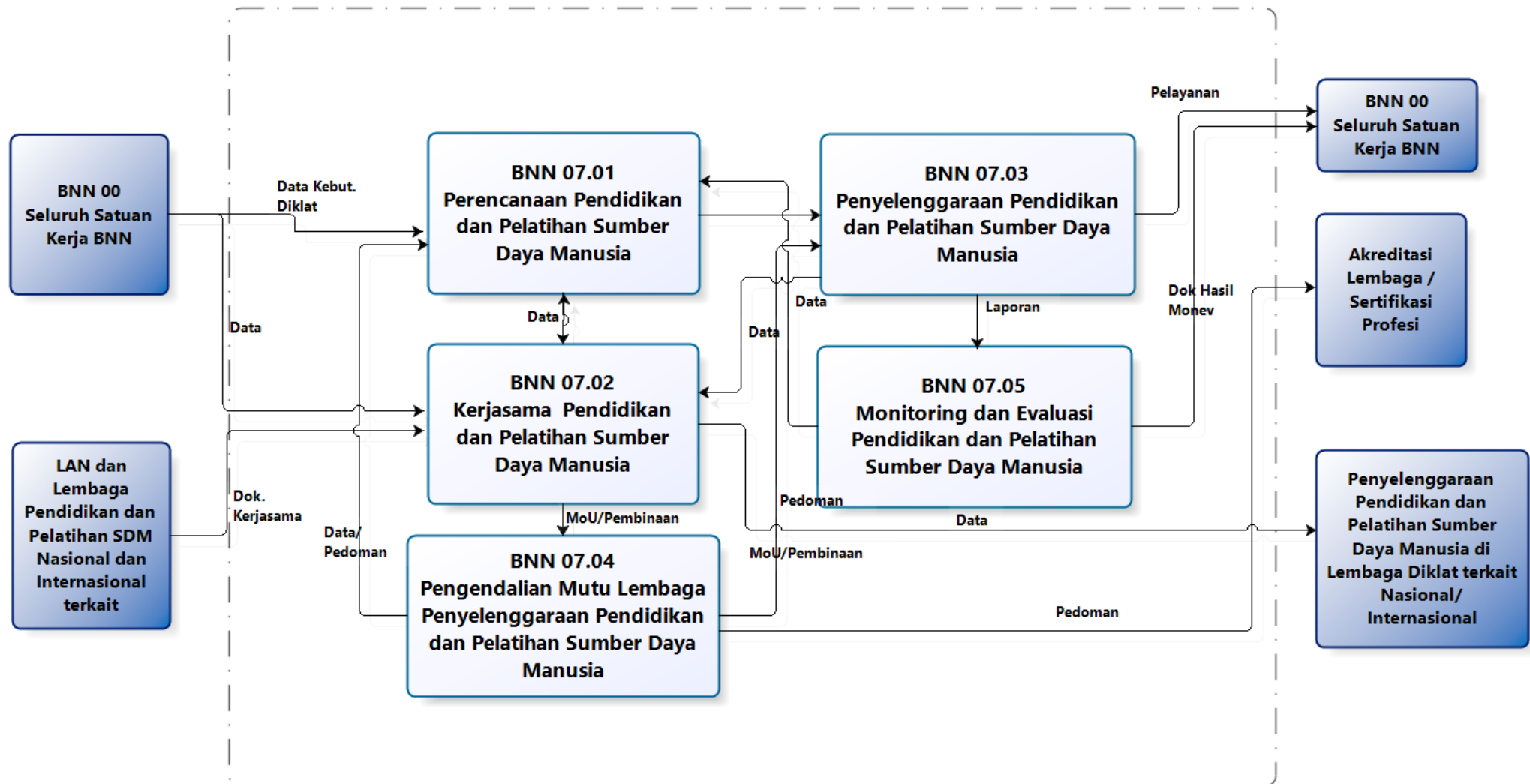
Gambar 5. BNN.04 Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika



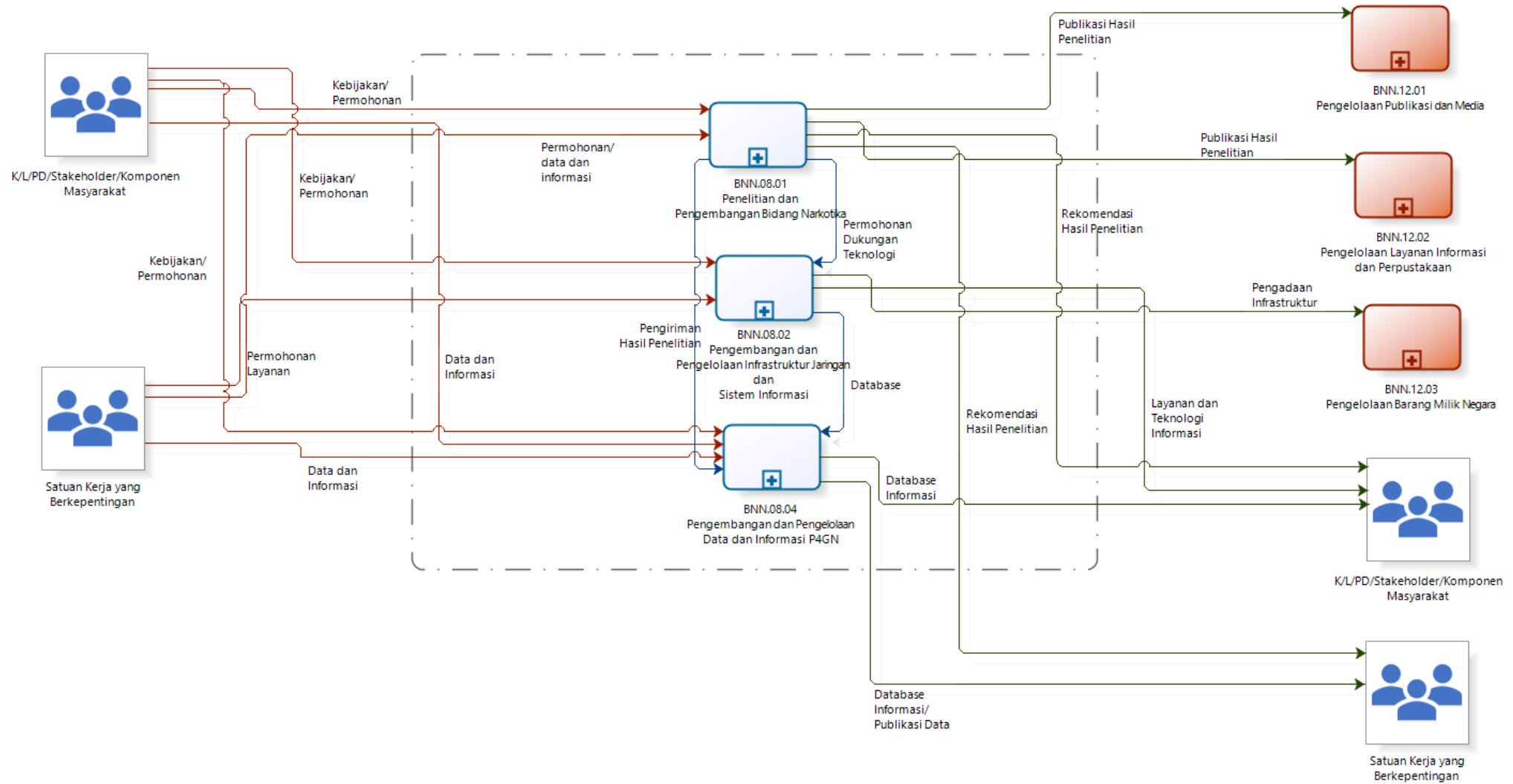
Gambar 6. BNN.05 Pengelolaan Sistem Pengawasan



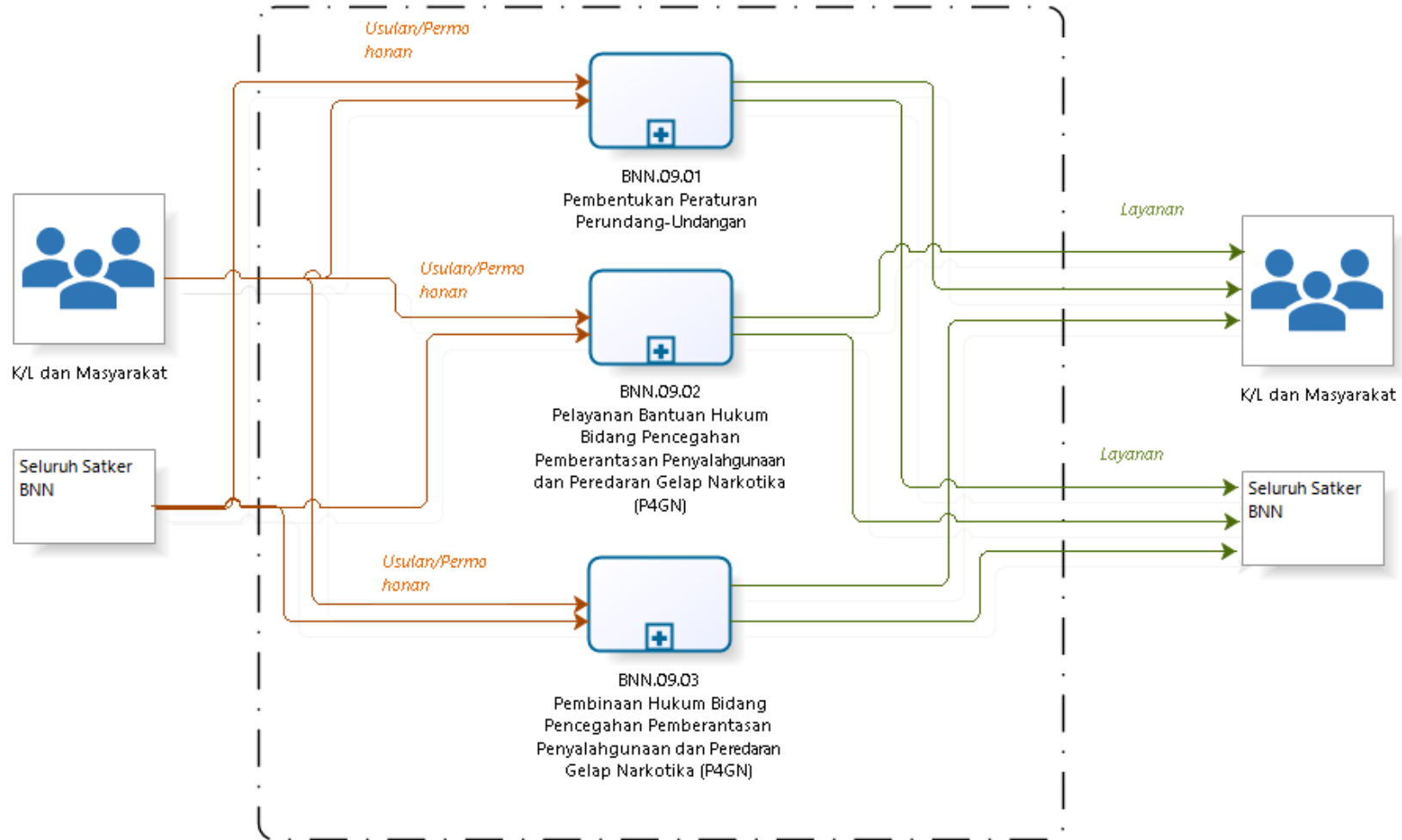
Gambar 7. BNN.06 Manajemen Organisasi dan Kinerja



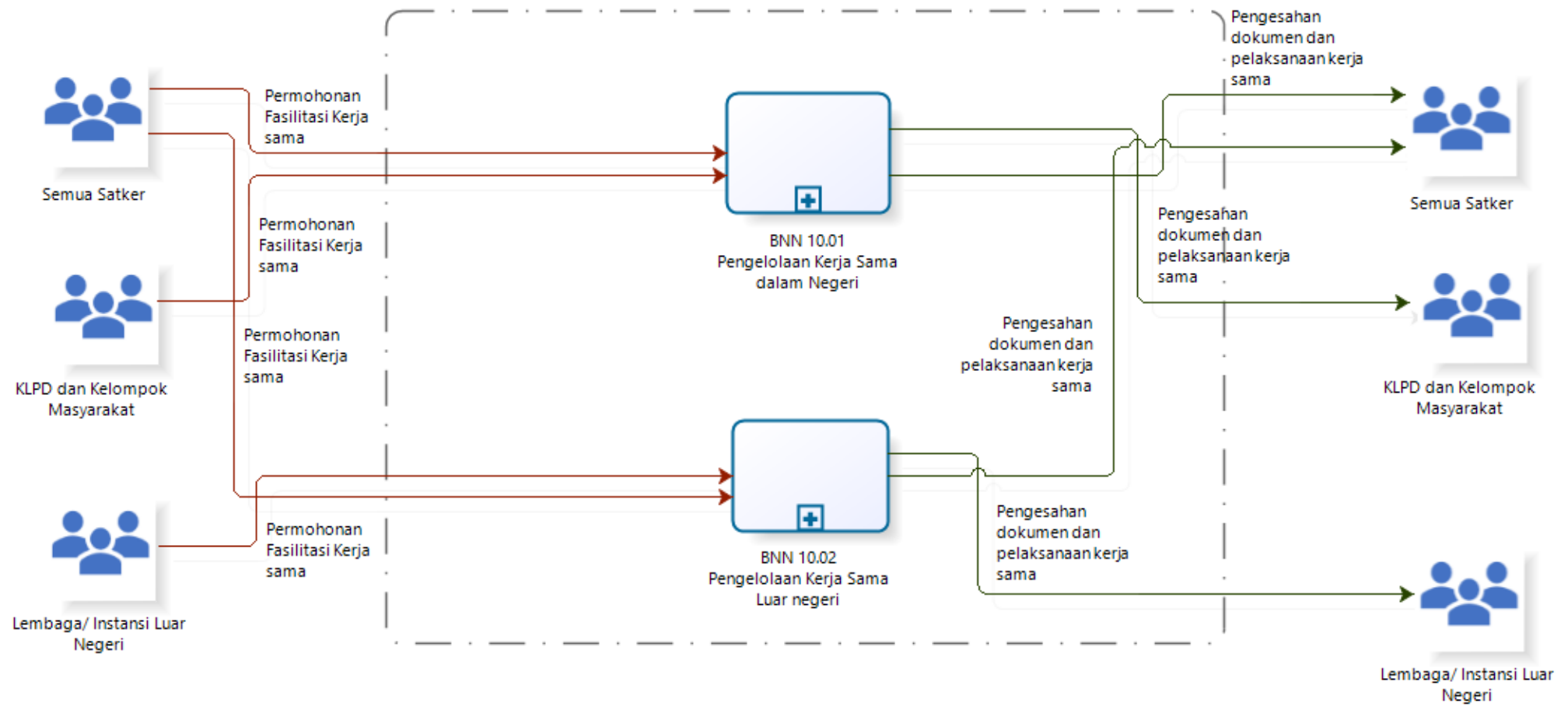
Gambar 8. BNN.07 Pengembangan Sumber Daya Manusia



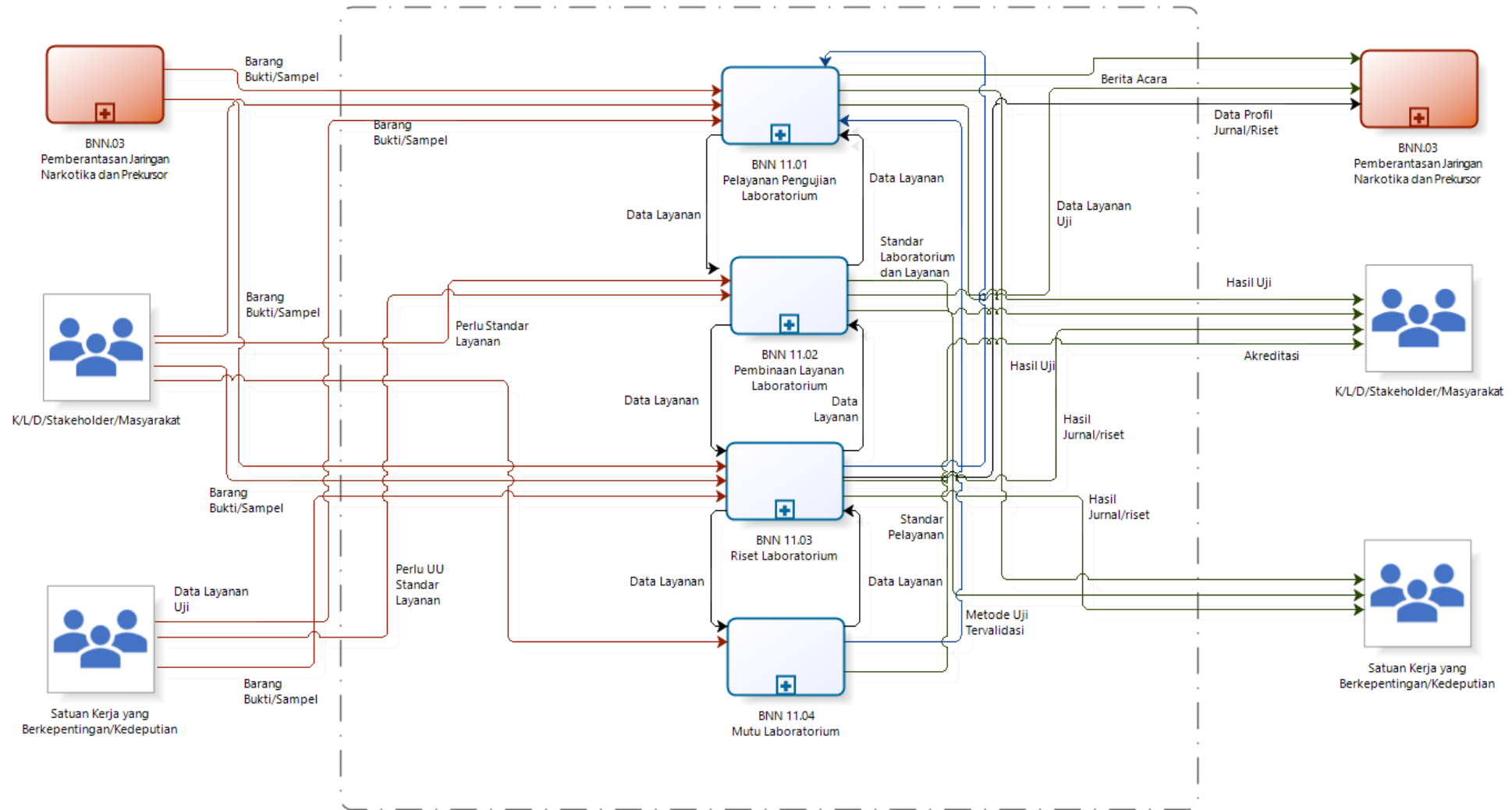
Gambar 9. BNN.08 Penelitian, Layanan Data, dan Pengembangan Teknologi Informasi



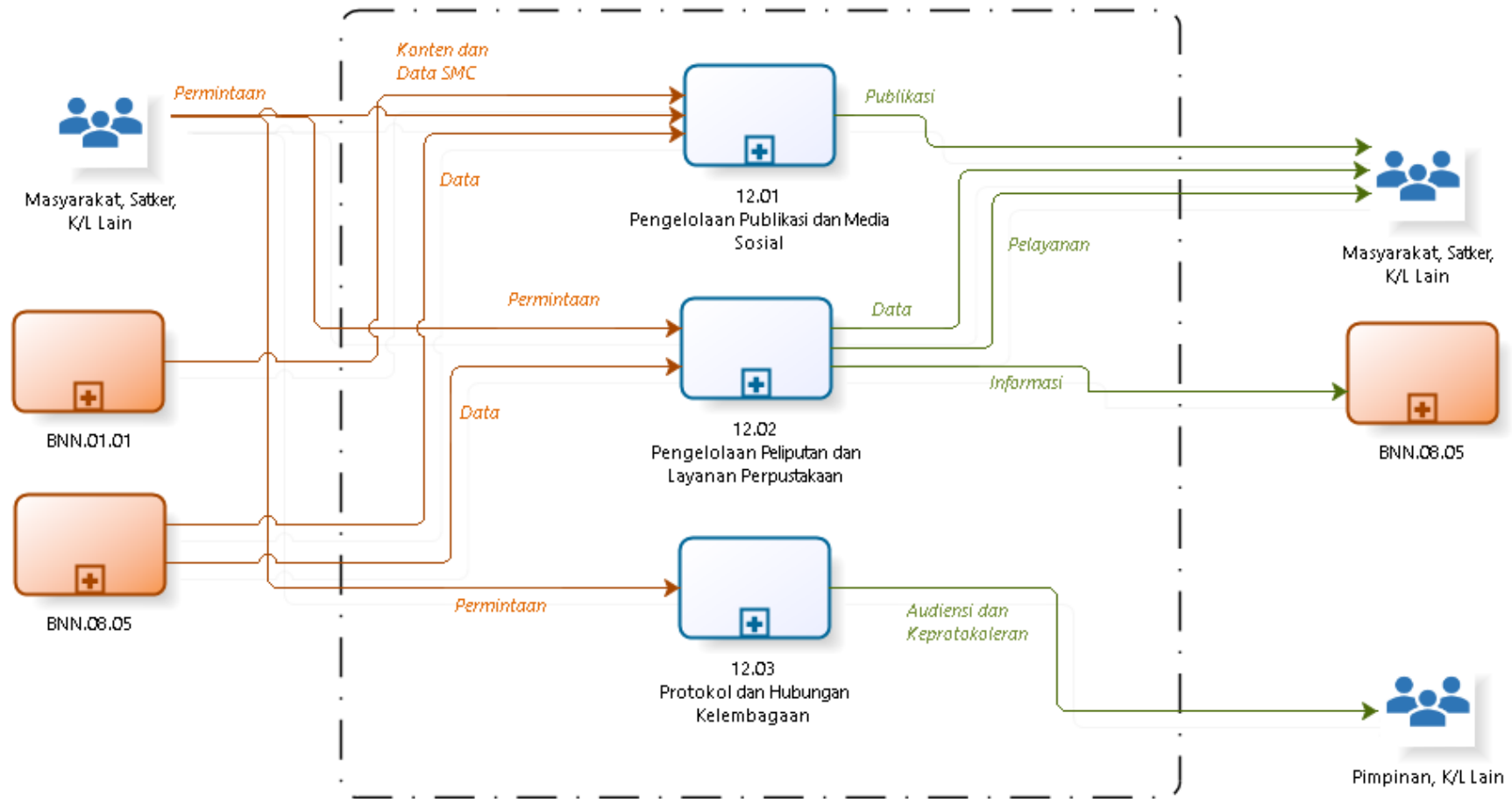
Gambar 10. BNN.09 Pengelolaan Layanan Hukum



Gambar 11. BNN.10 Pengelolaan Layanan Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga

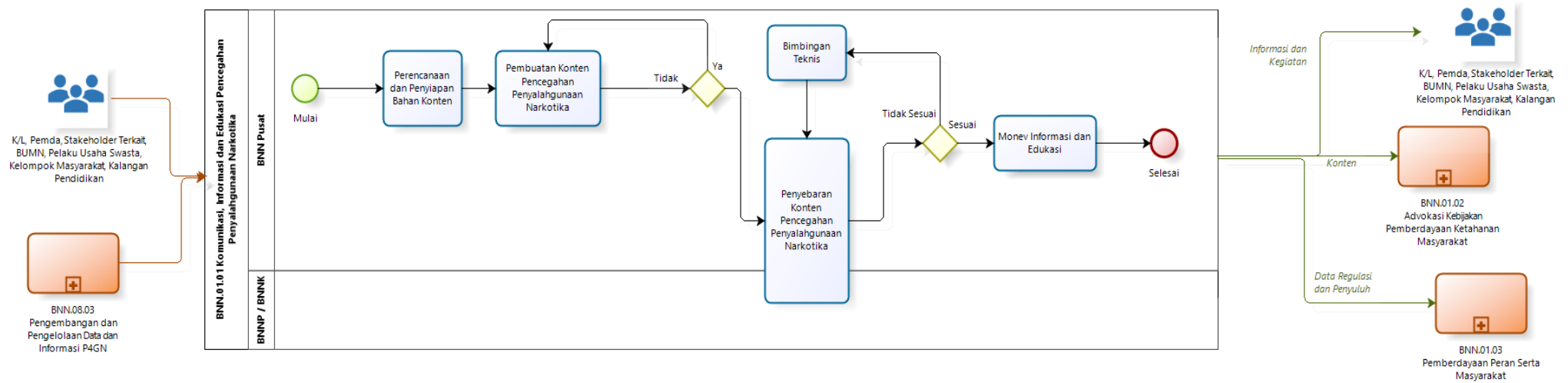


Gambar 12. BNN.11 Pengelolaan Layanan Laboratorium Narkotika

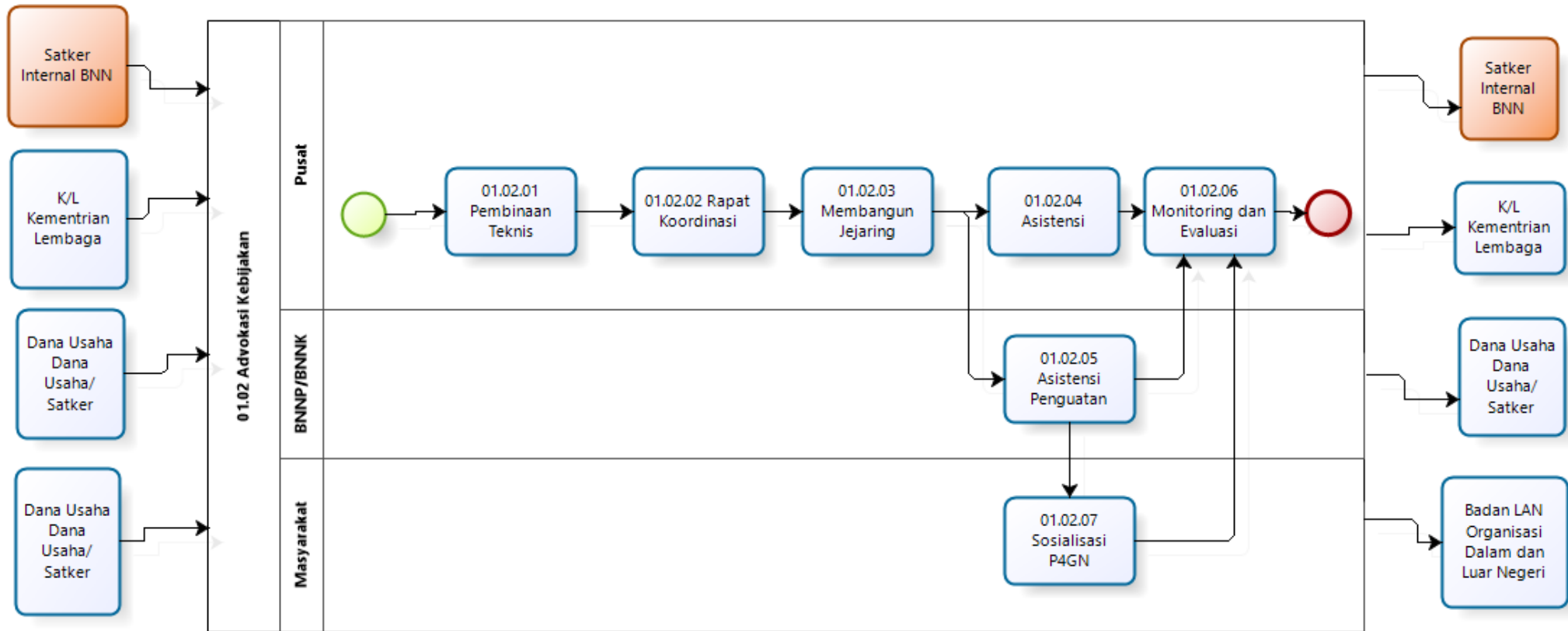


Gambar 13. BNN.12 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

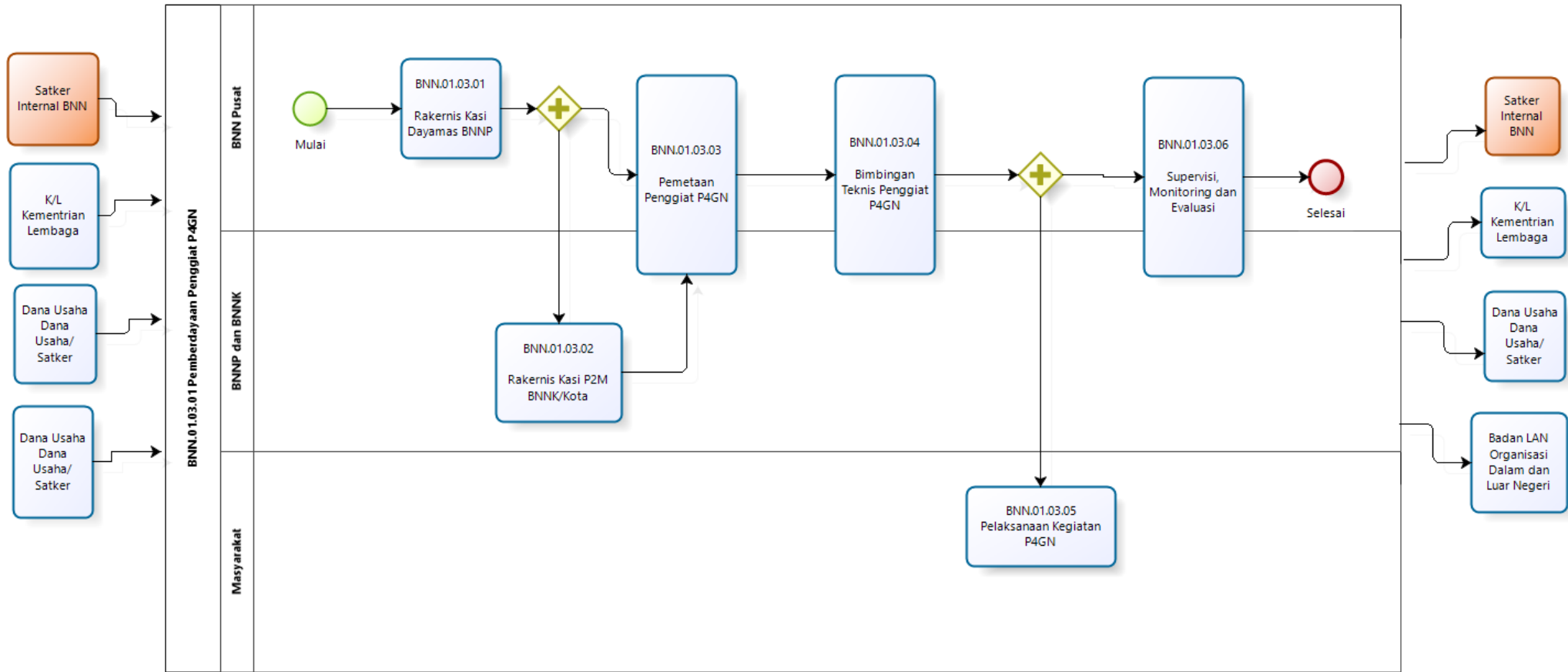
B. Proses Bisnis Level 2 BNN



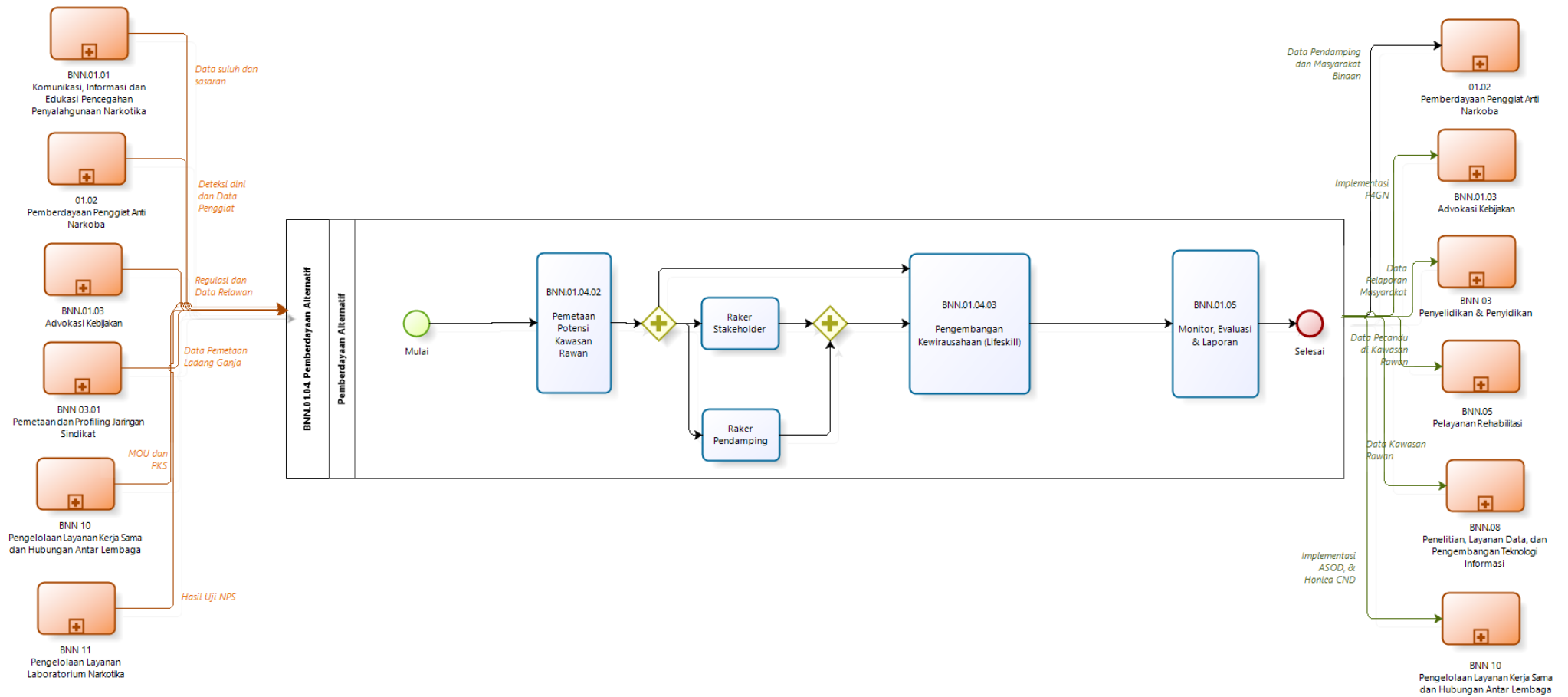
Gambar 14. BNN.01.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika



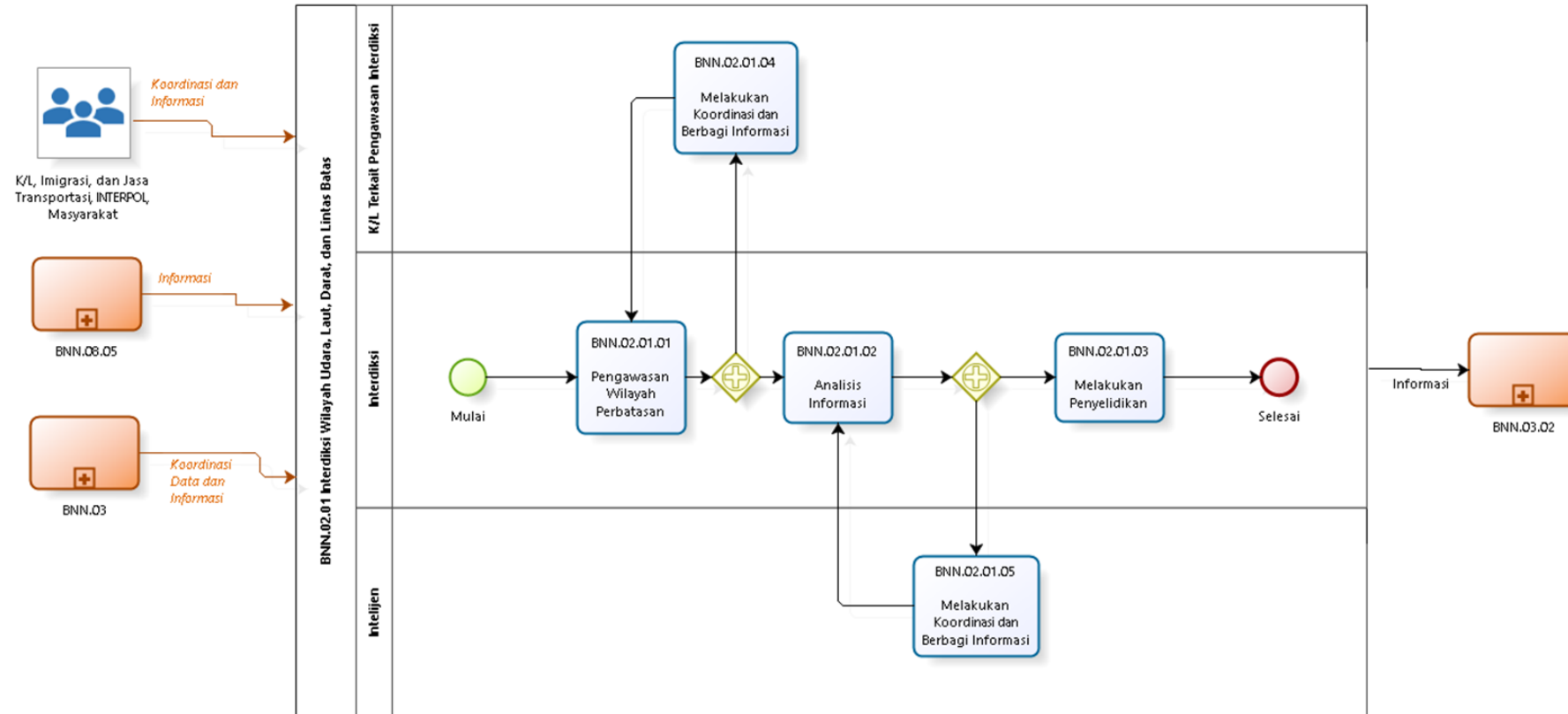
Gambar 15. BNN.01.02 Advokasi Kebijakan



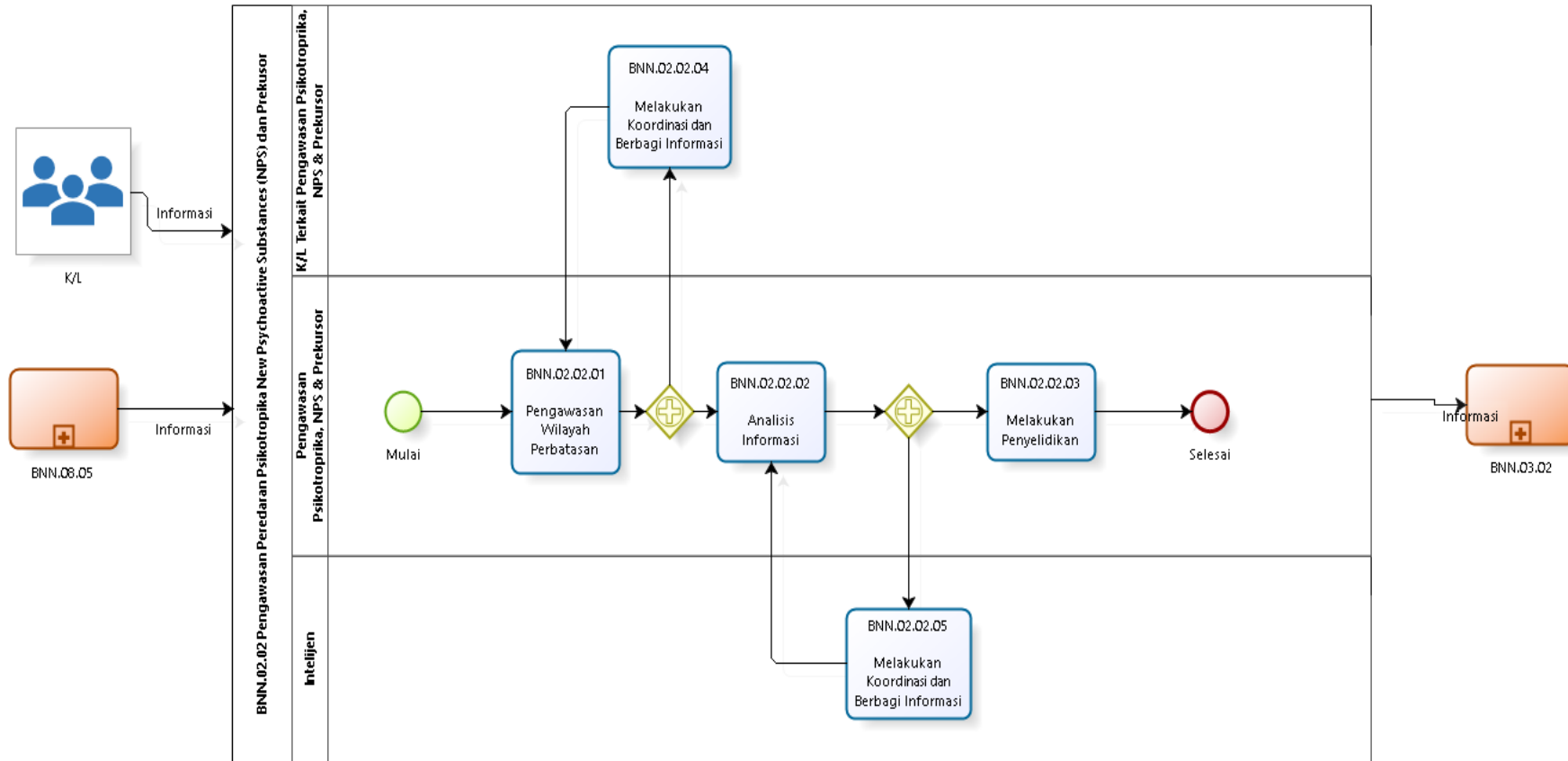
Gambar 16. BNN.01.03 Pemberdayaan Penggiat P4GN



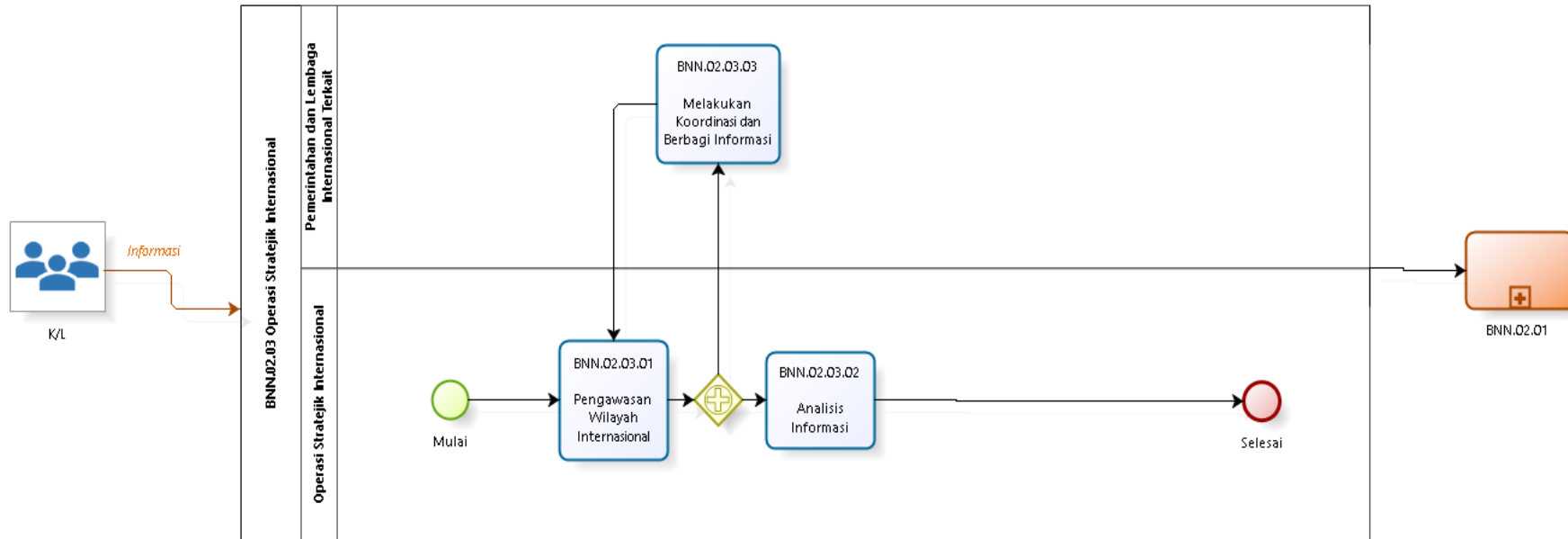
Gambar 17. BNN.01.04. Pembederayaan Alternatif



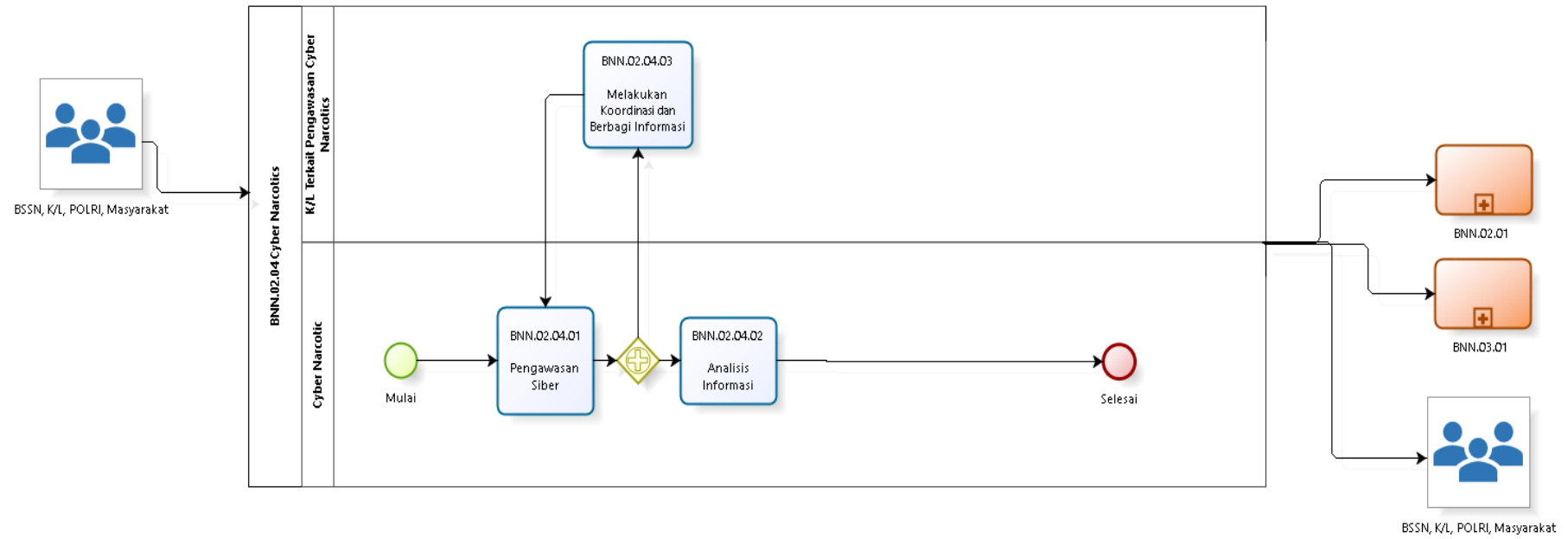
Gambar 18. BNN.02.01 Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Batas



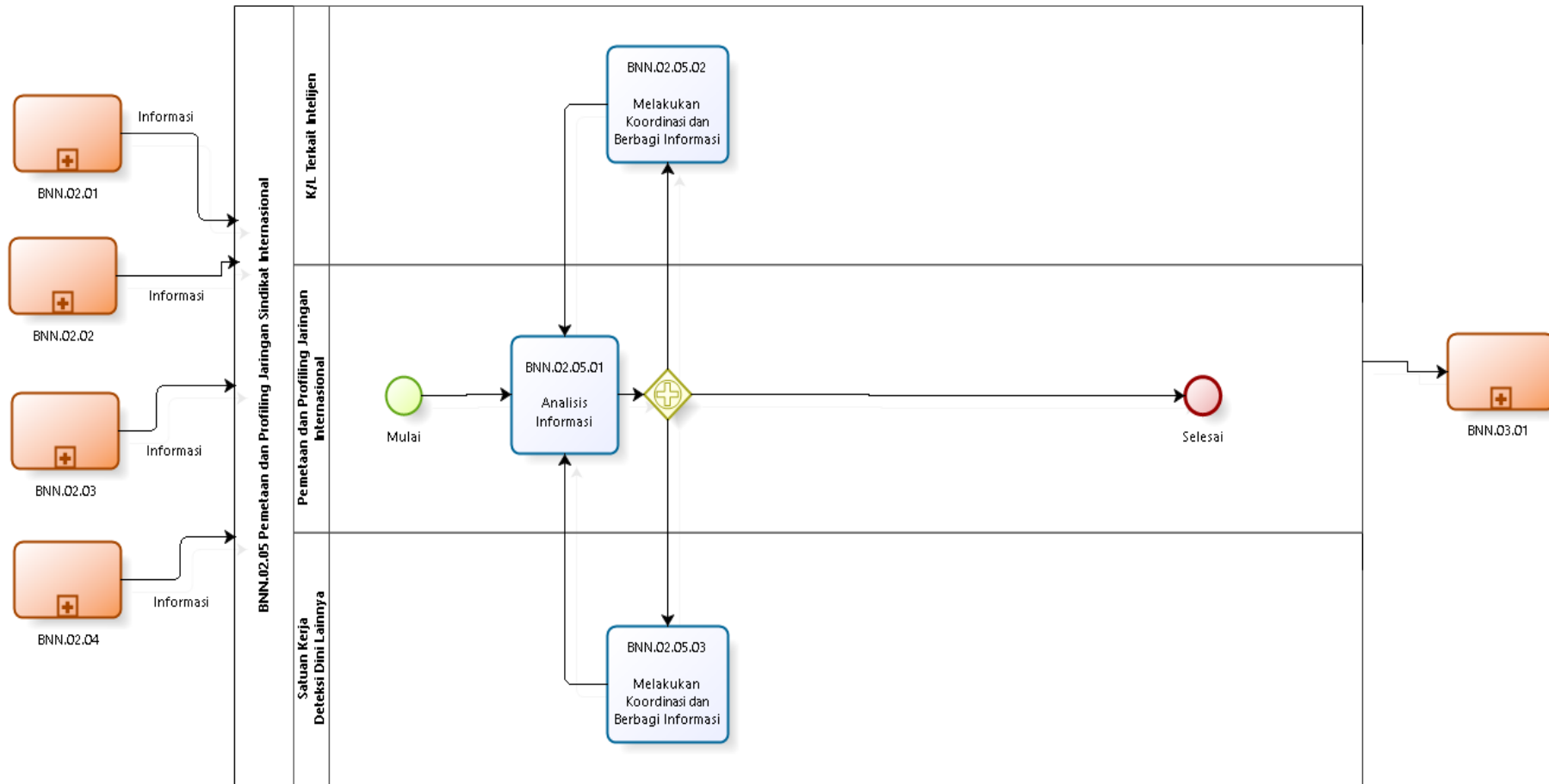
Gambar 19. BNN.02.02 Pengawasan Peredaran Psikotropika New Psychoactive Substances (NPS) dan Prekursor



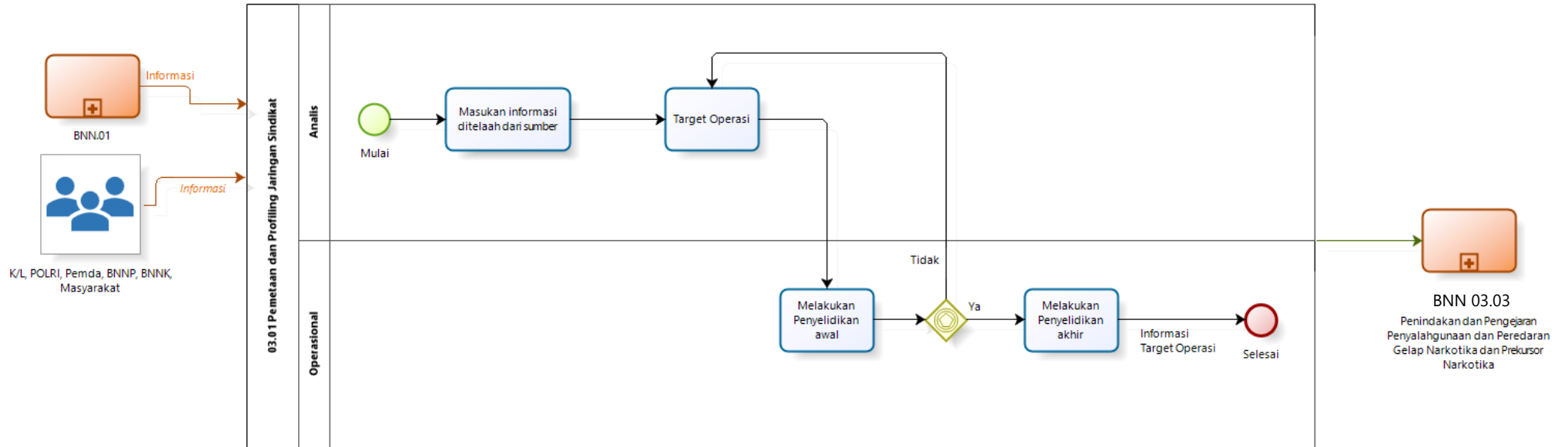
Gambar 20. BNN.02.03 Operasi Strategik Internasional



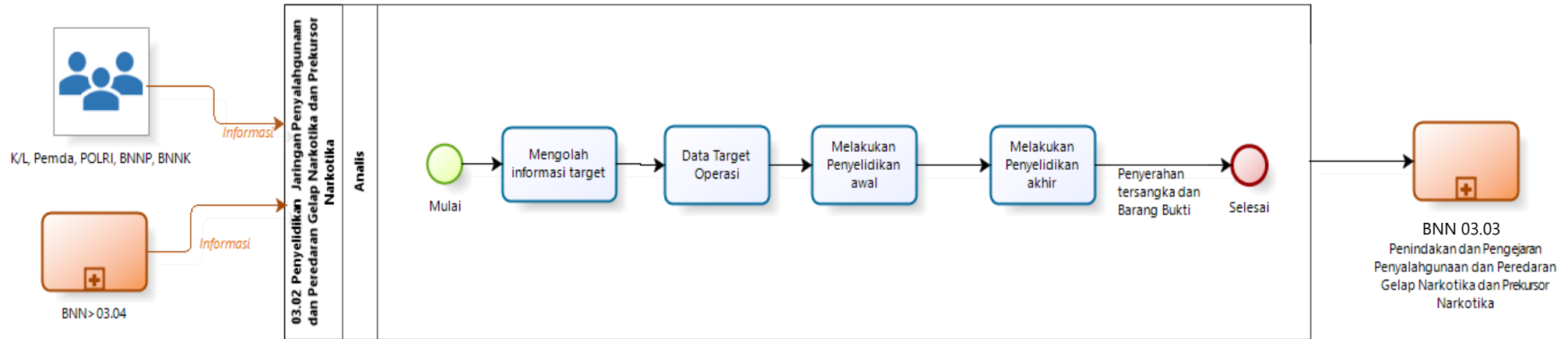
Gambar 21. BNN.02.04 Cyber Narcotics



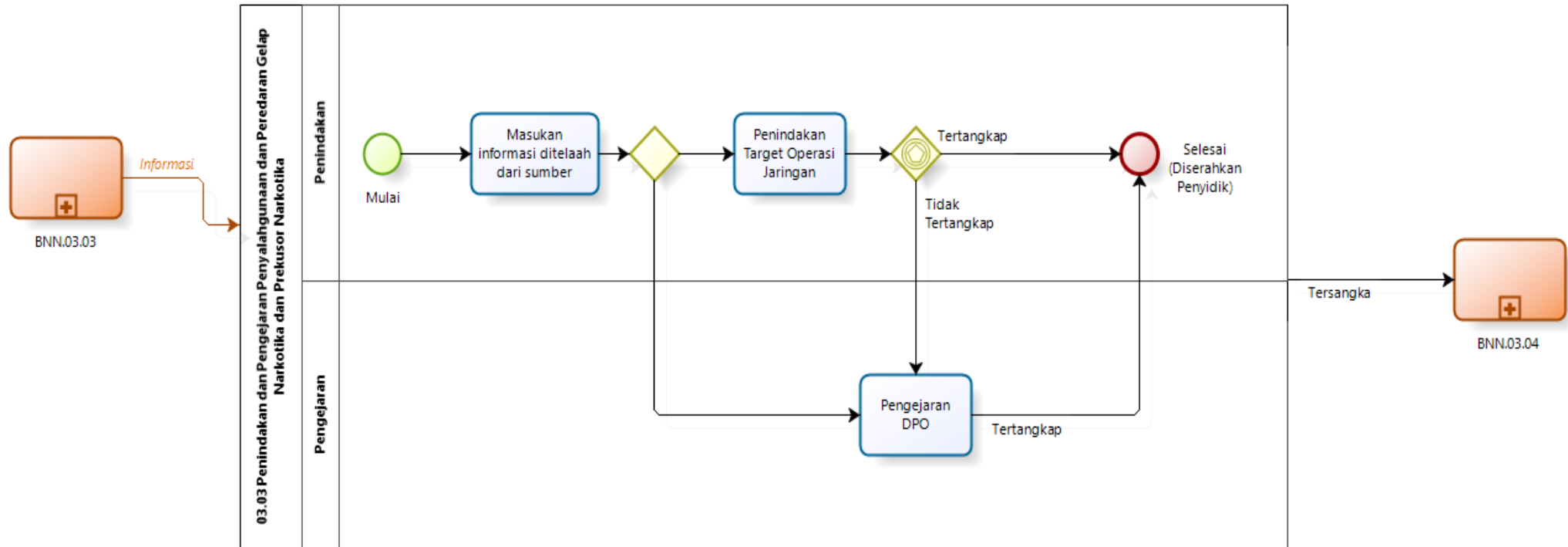
Gambar 22. BNN.02.05 Pemetaan dan Profiling Jaringan Sindikat Internasional



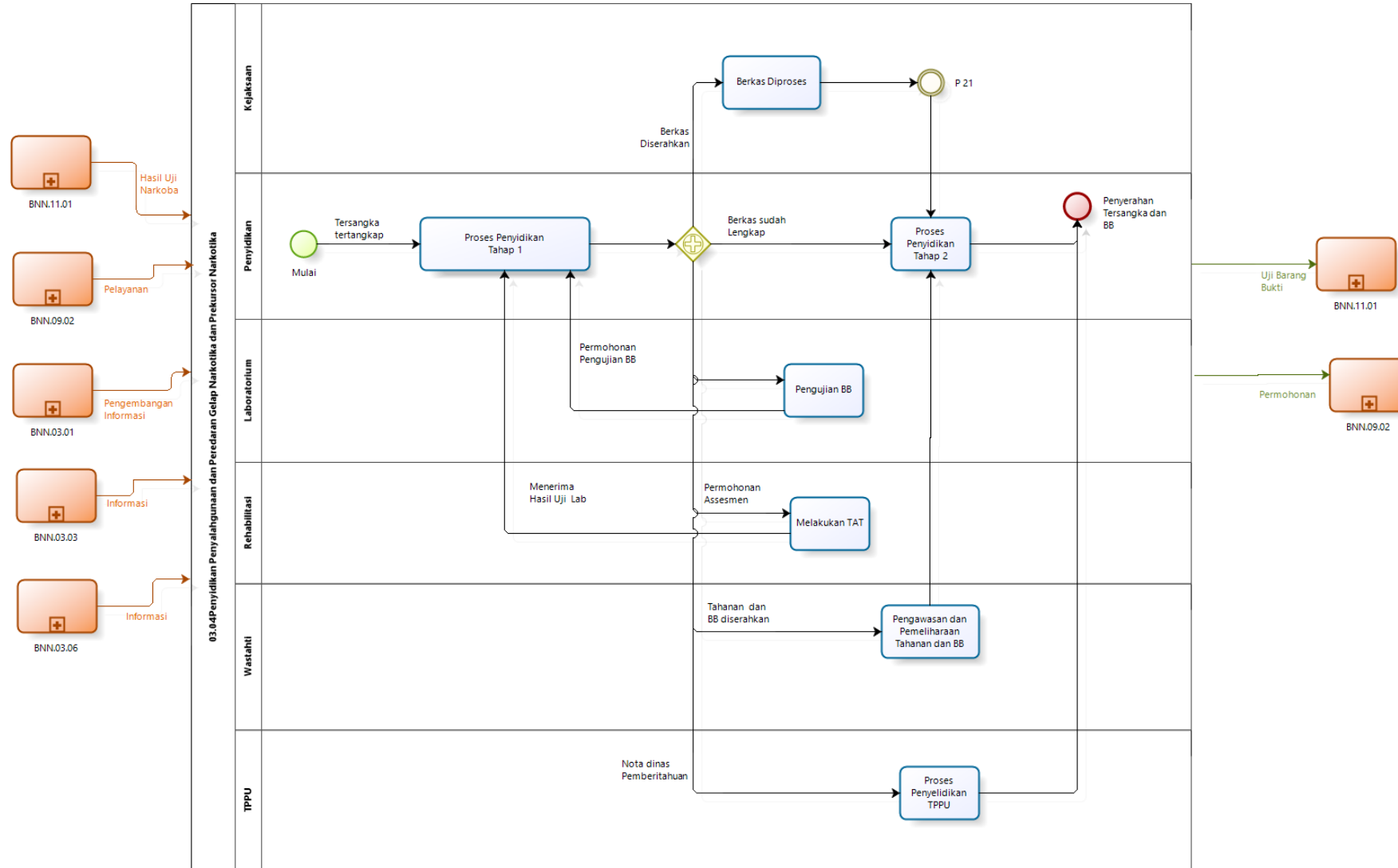
Gambar 23. **BNN.03.01 Pemetaan dan Profiling Jaringan Sindikat**



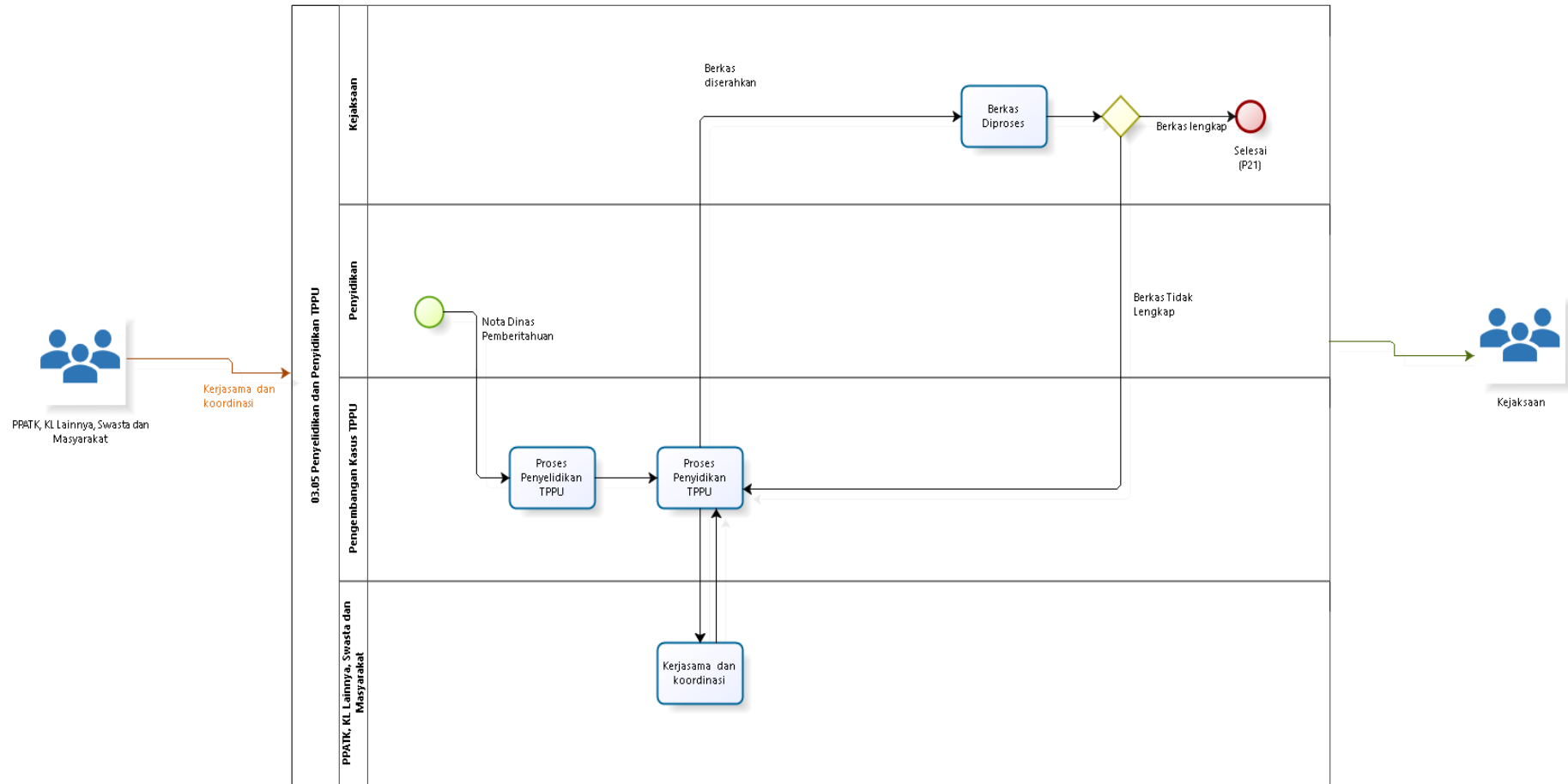
Gambar 24. BNN.03.02 Penyelidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



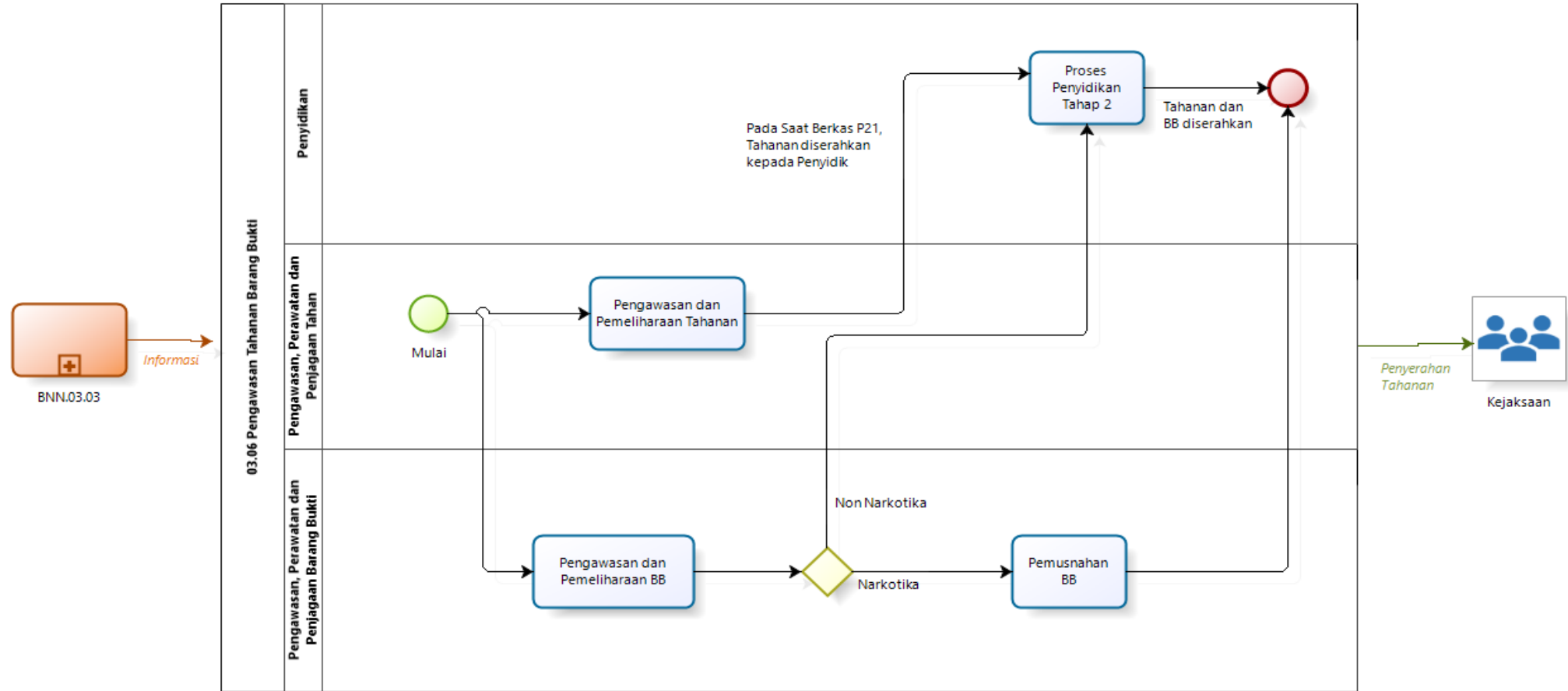
Gambar 25. BNN.03.03 Penindakan dan Pengejaran Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



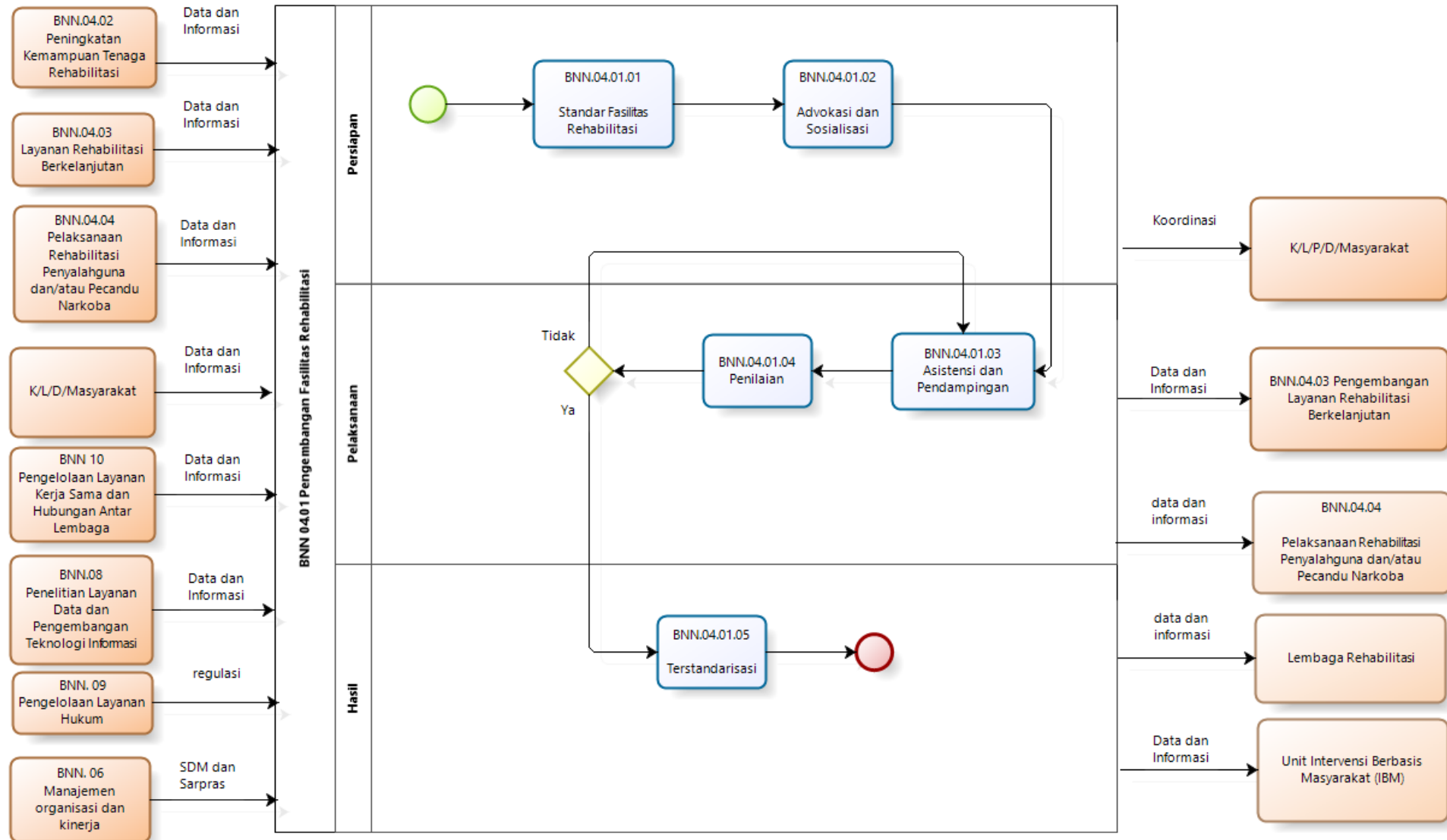
Gambar 26. BNN.03.04 Penyidikan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



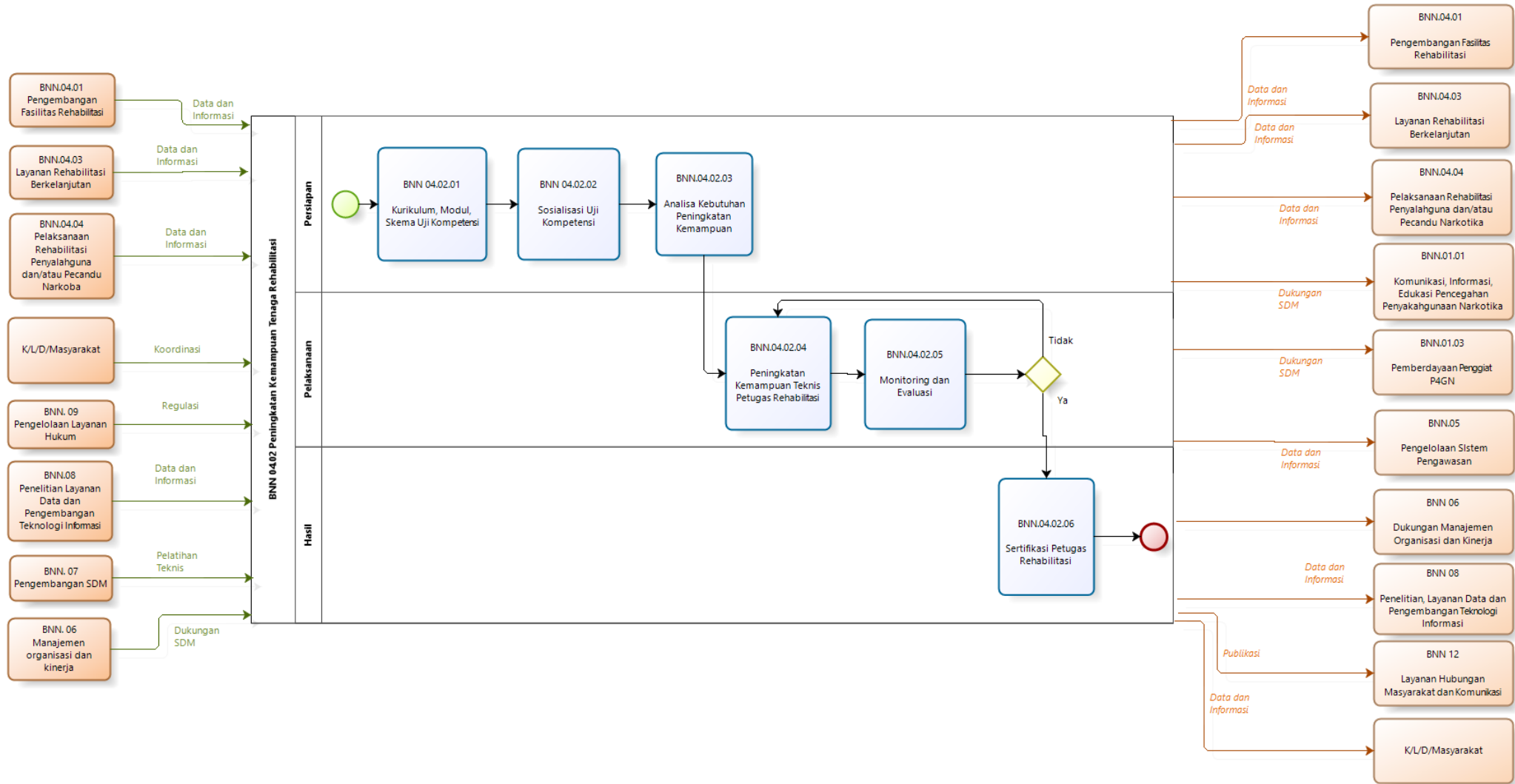
Gambar 27. BNN.03.05 Penyelidikan dan Penyidikan TPPU



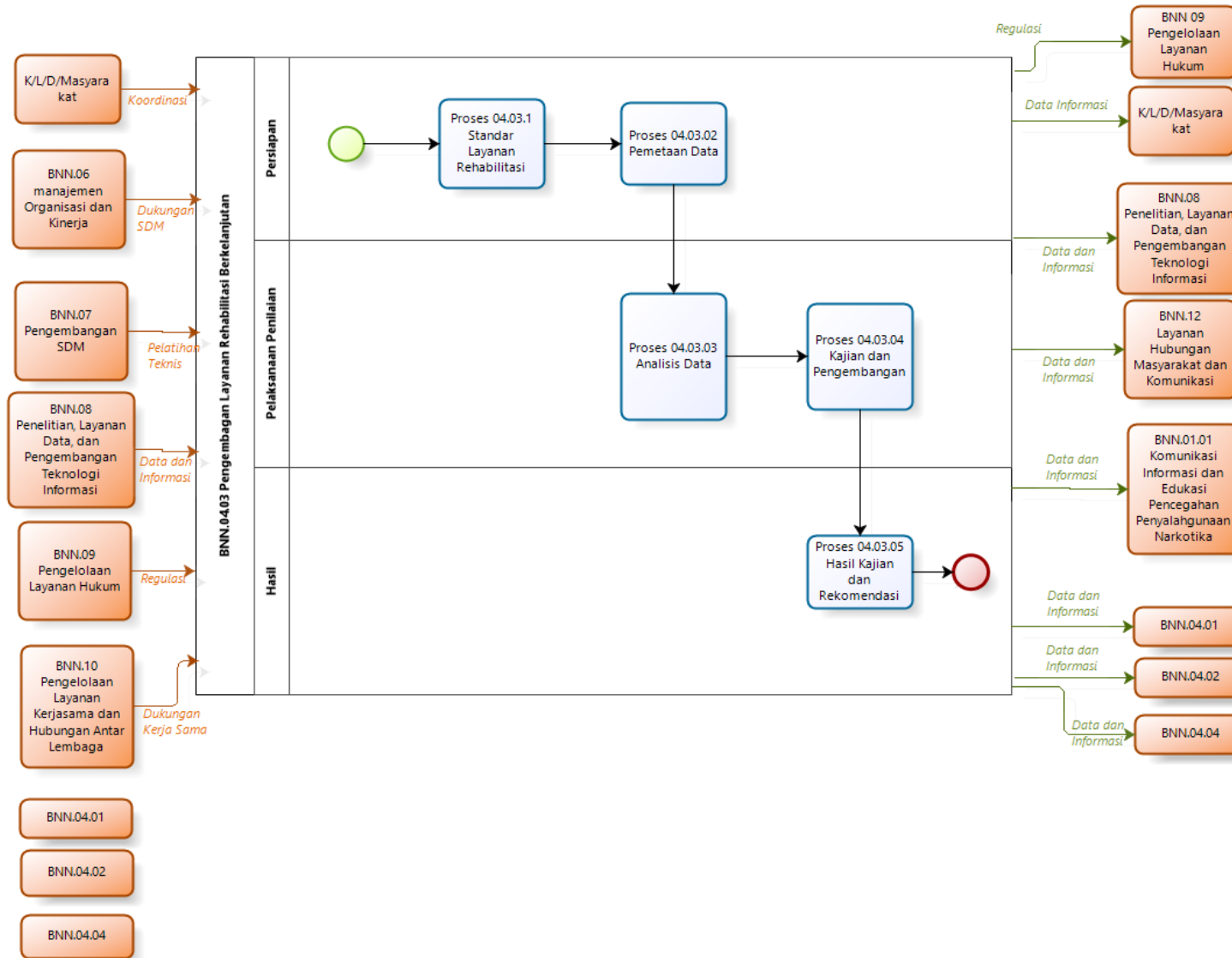
Gambar 28. BNN.03.06 Pengawasan Tahanan Barang Bukti



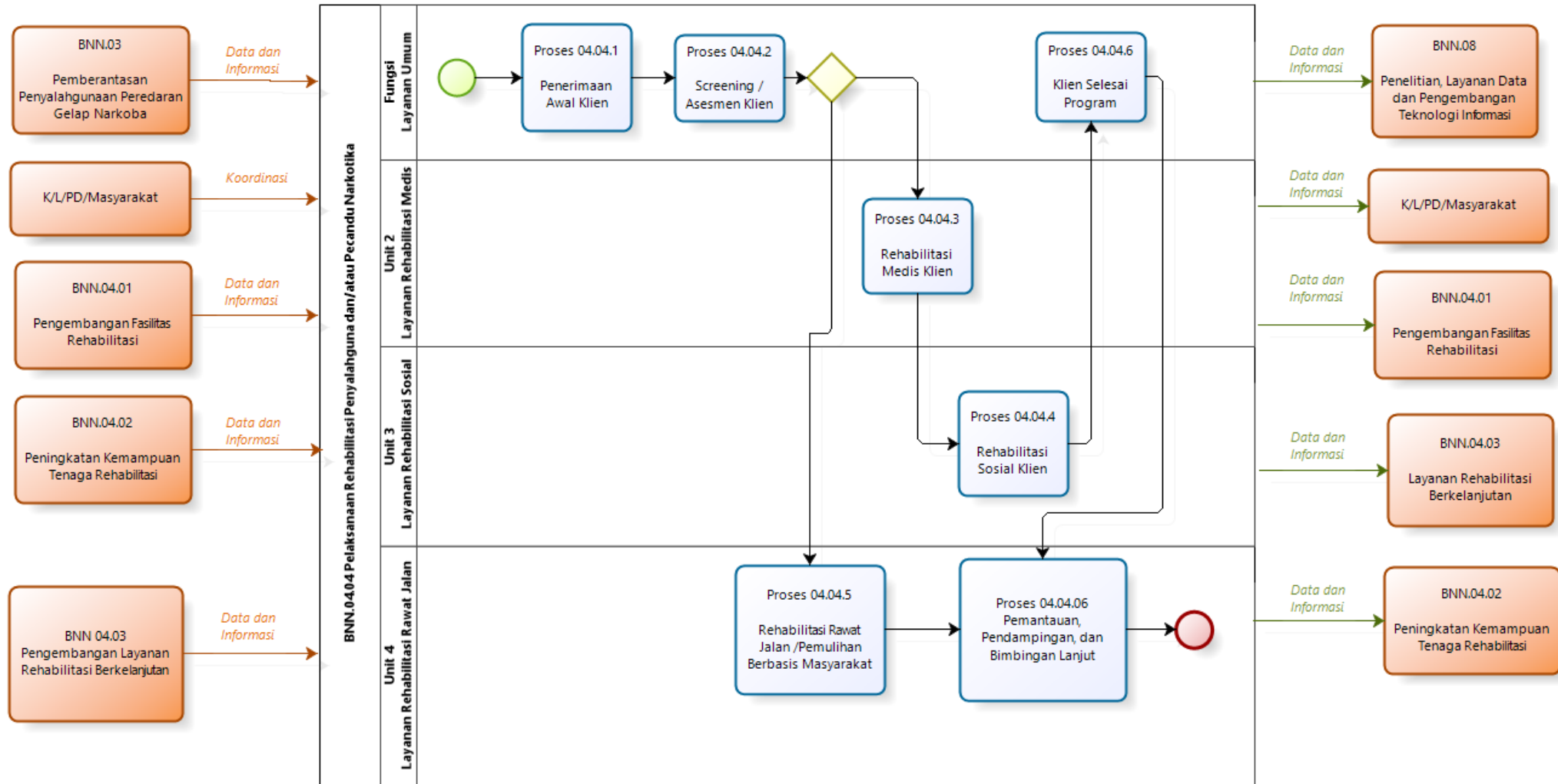
Gambar 29. BNN 04.01 Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi



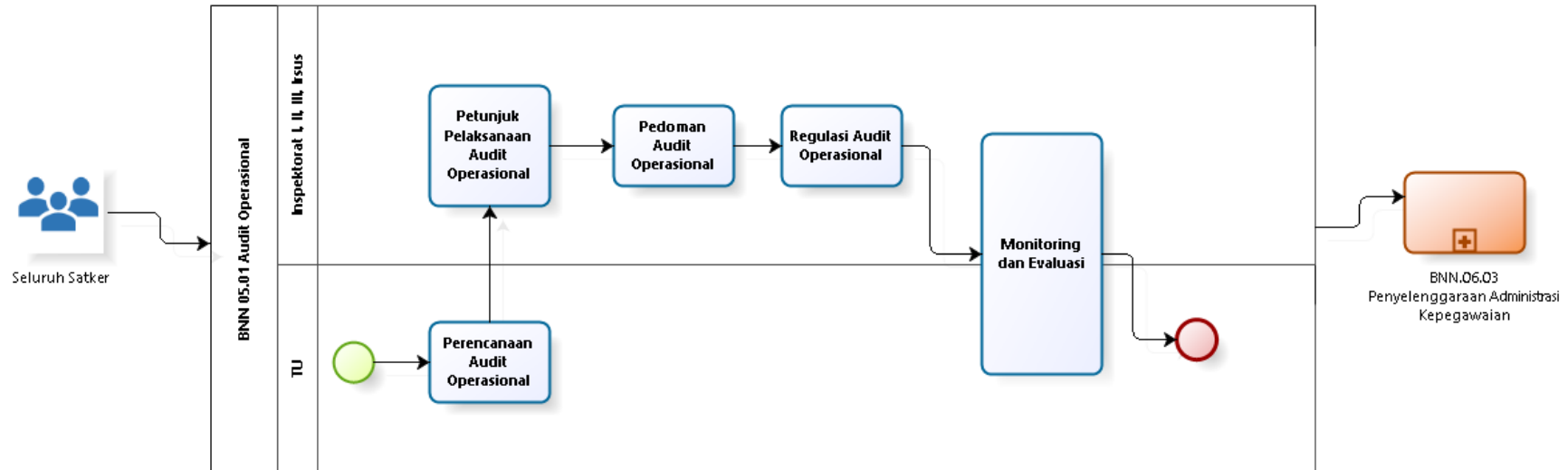
Gambar 30. BNN 04.02 Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi



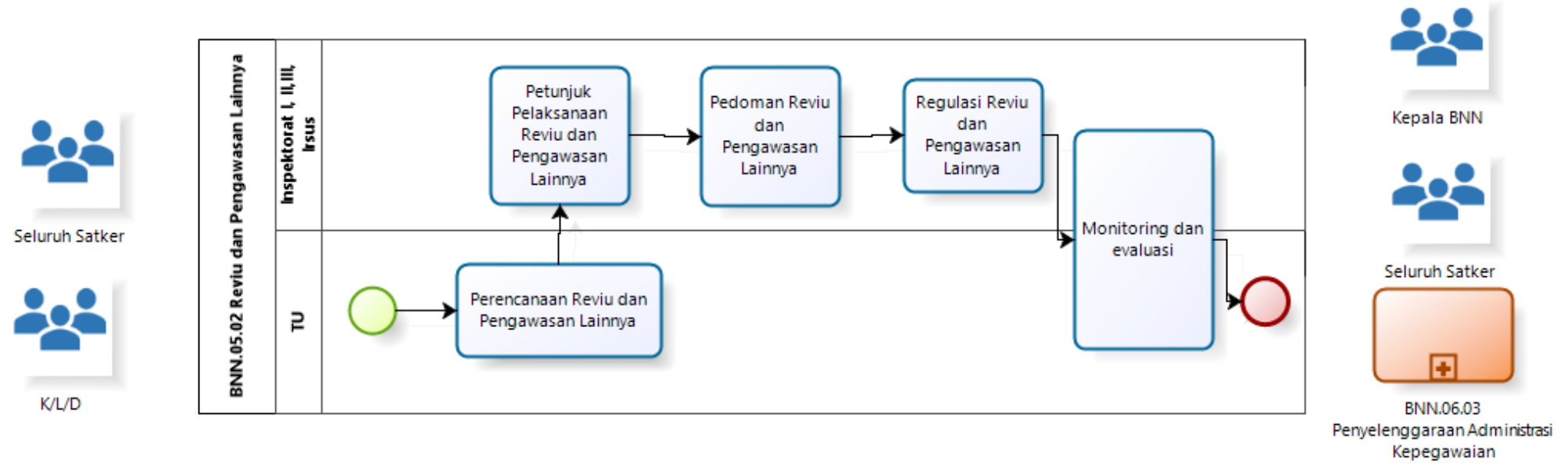
Gambar 31. BNN 04.03 Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan



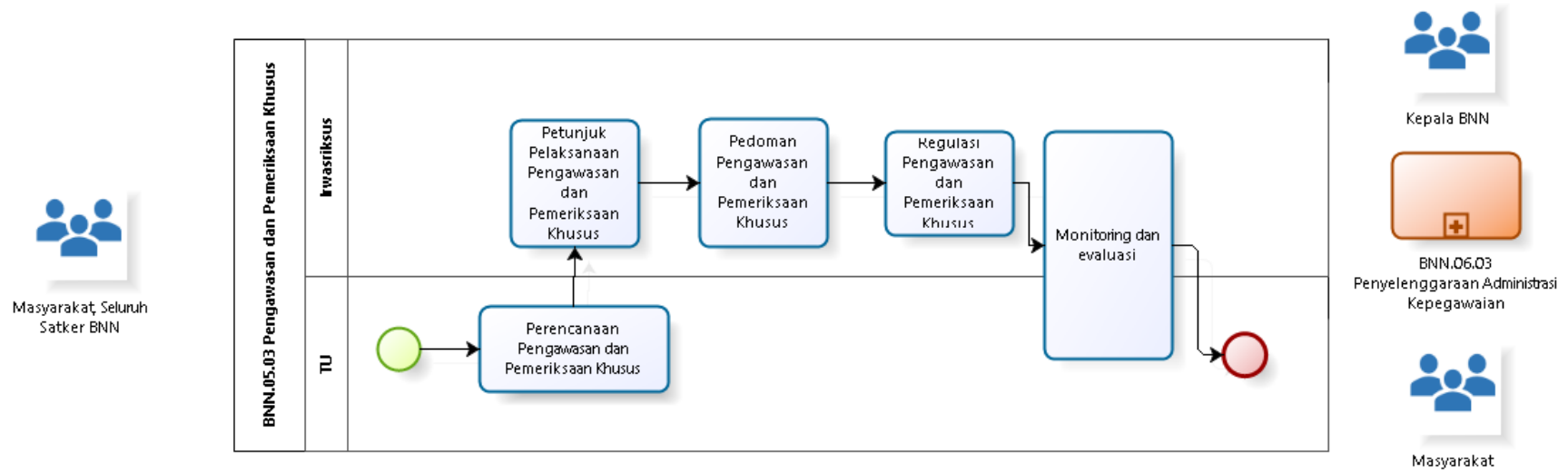
Gambar 32. BNN 04.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika



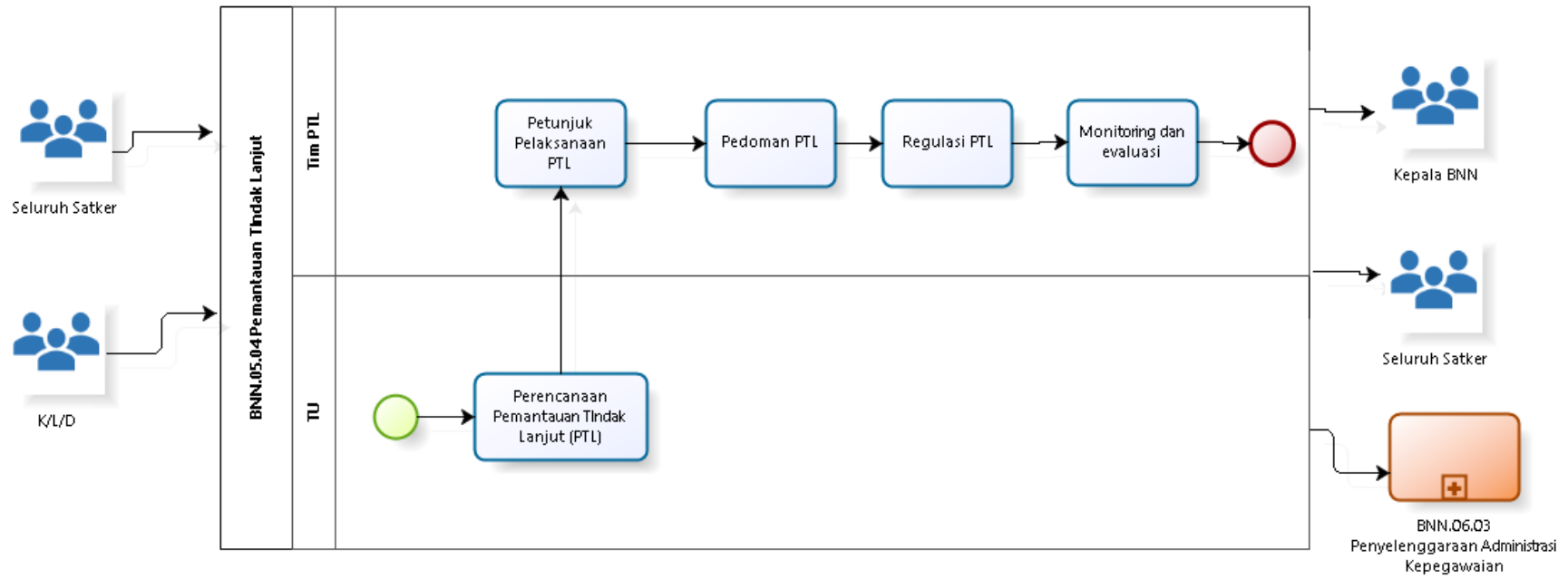
Gambar 33. BNN 05.01 Audit Operasional



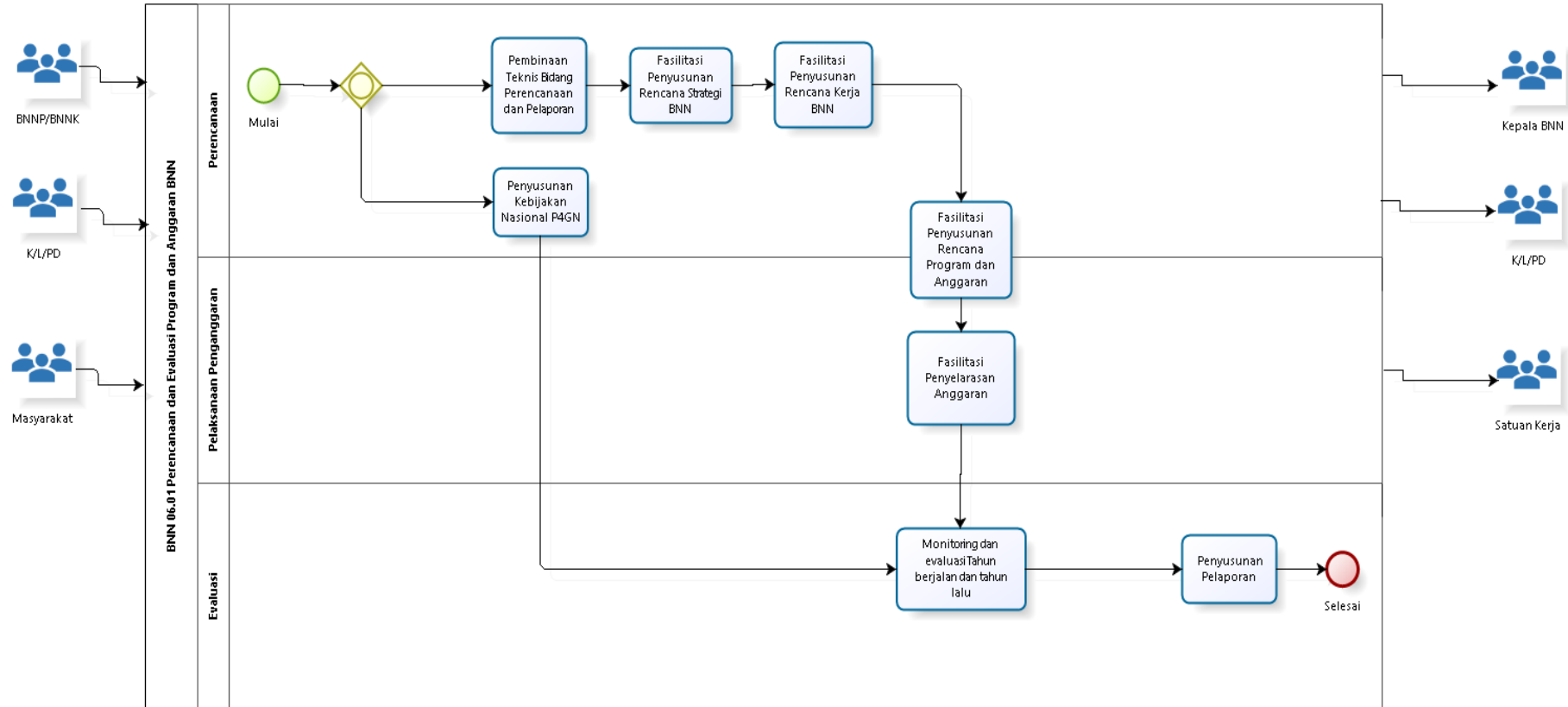
Gambar 34. BNN 05.02 Reviu dan Pengawasan Lainnya



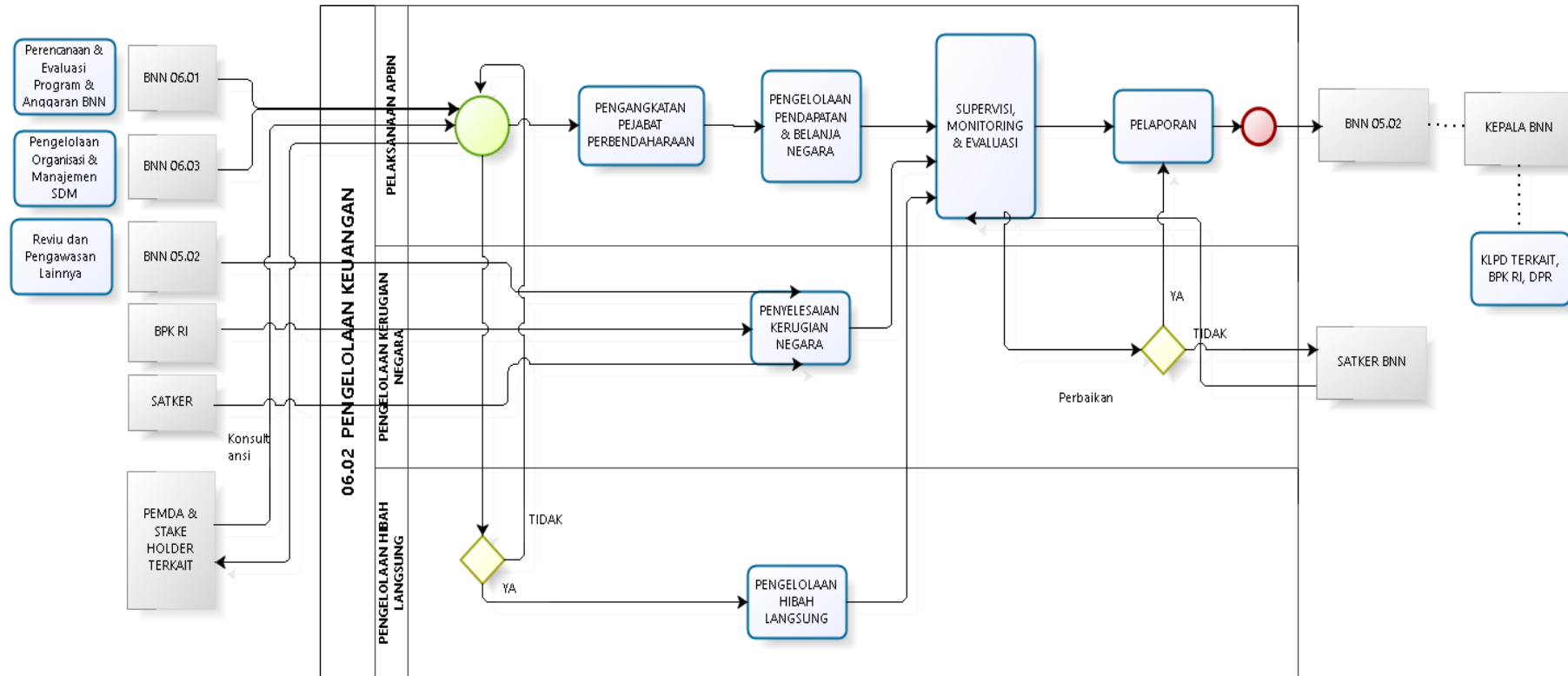
Gambar 35. BNN 05.03 Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus



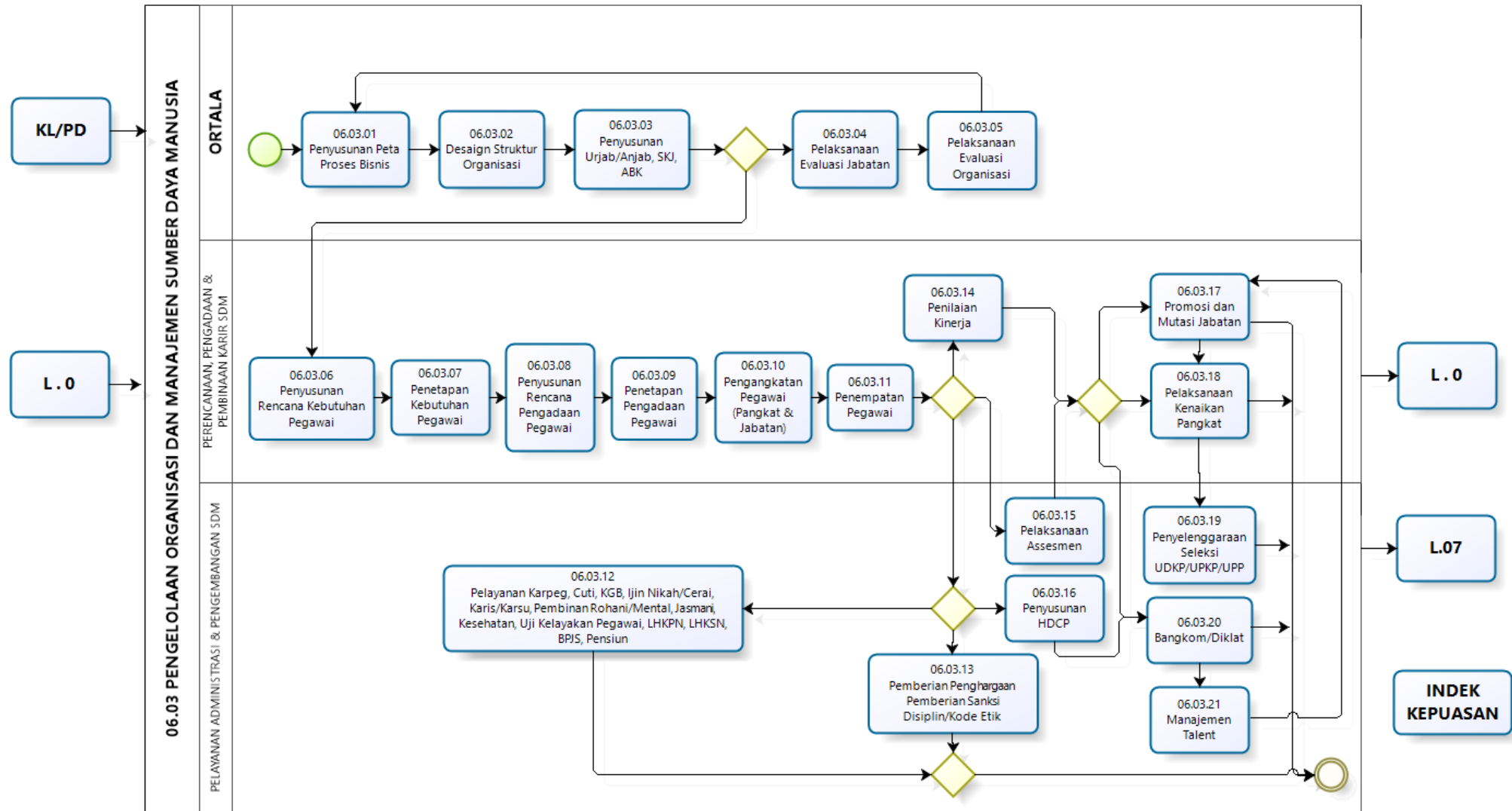
Gambar 36. BNN 05.04 Pemantauan Tindak Lanjut



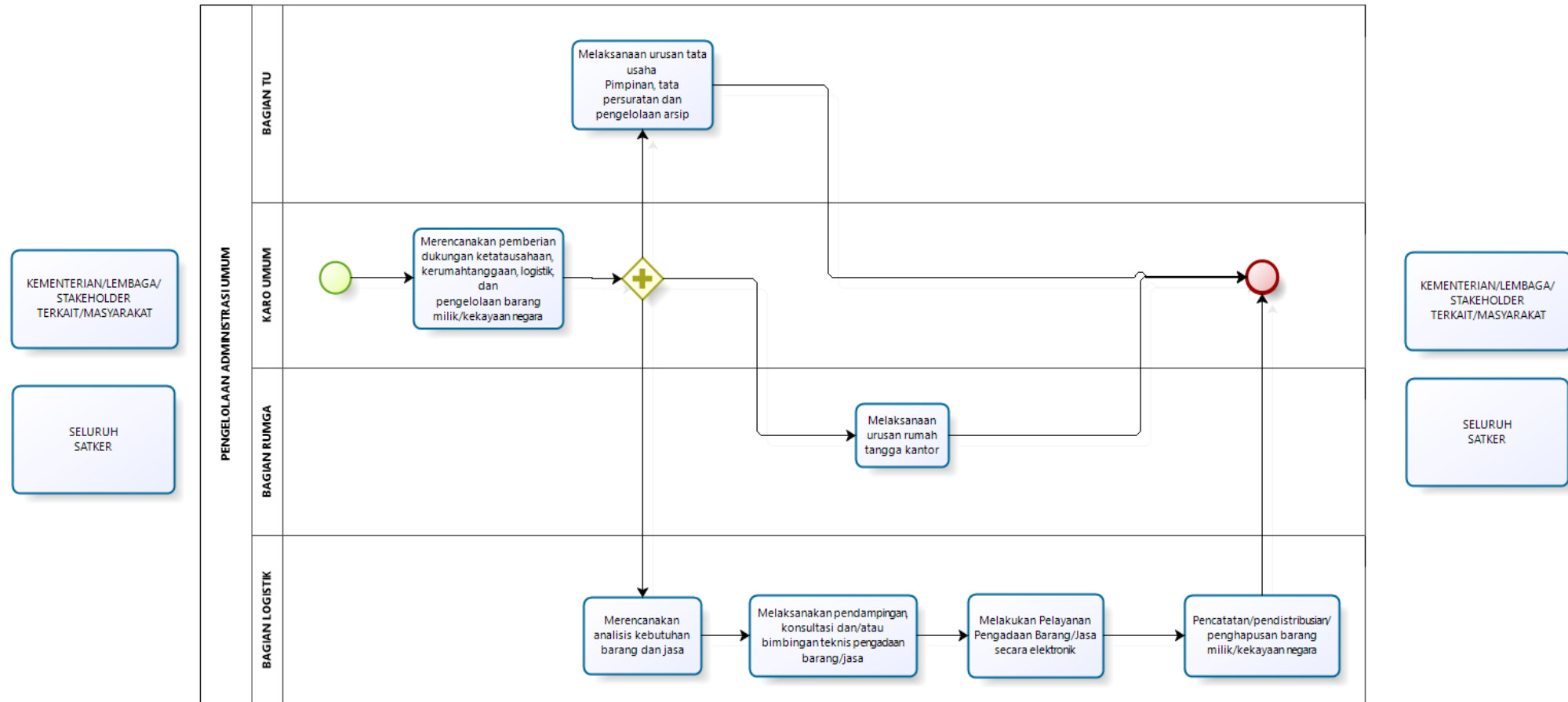
Gambar 37. BNN 06.01 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BNN



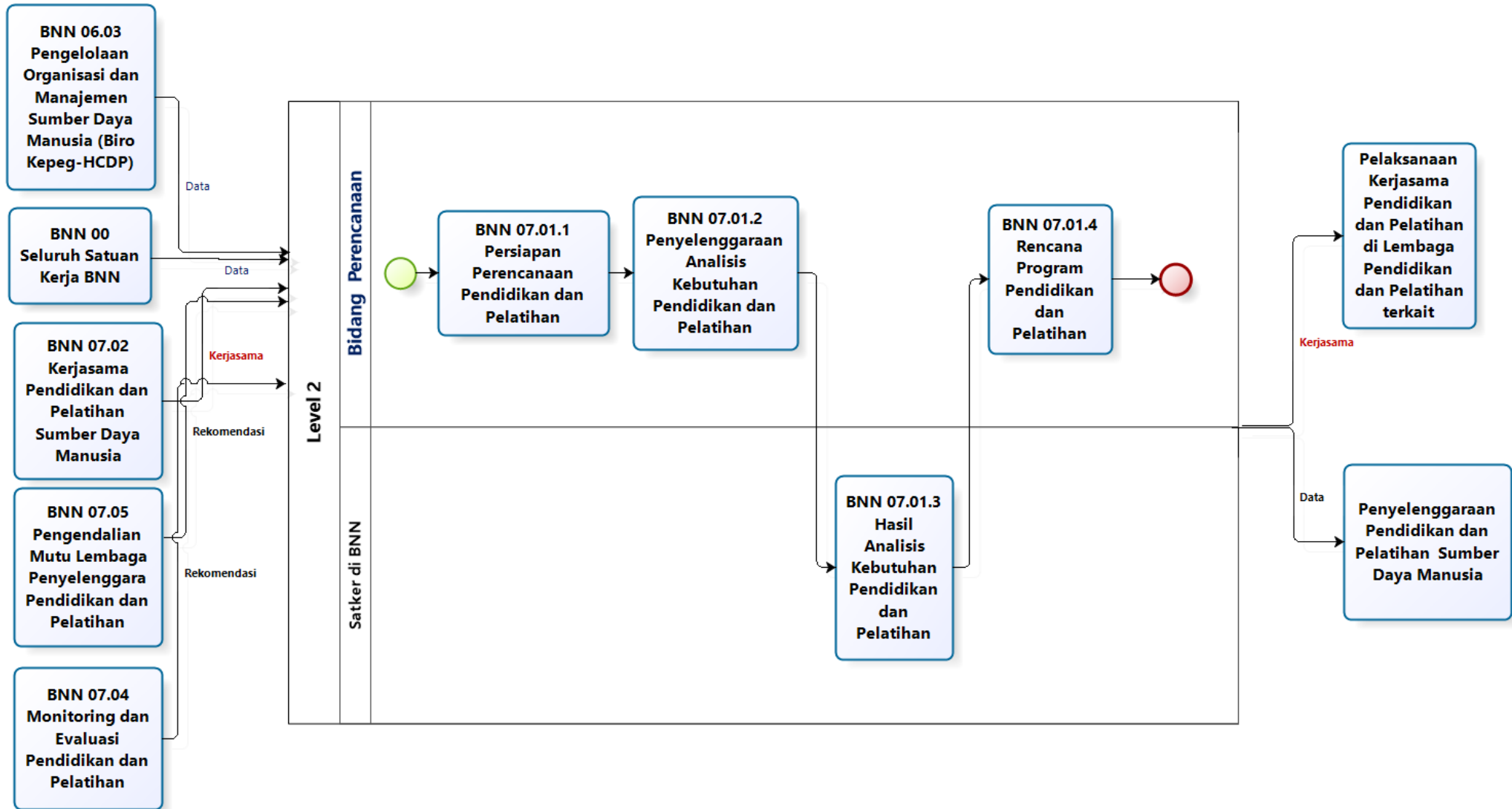
Gambar 38. BNN 06.02 Pengelolaan Keuangan



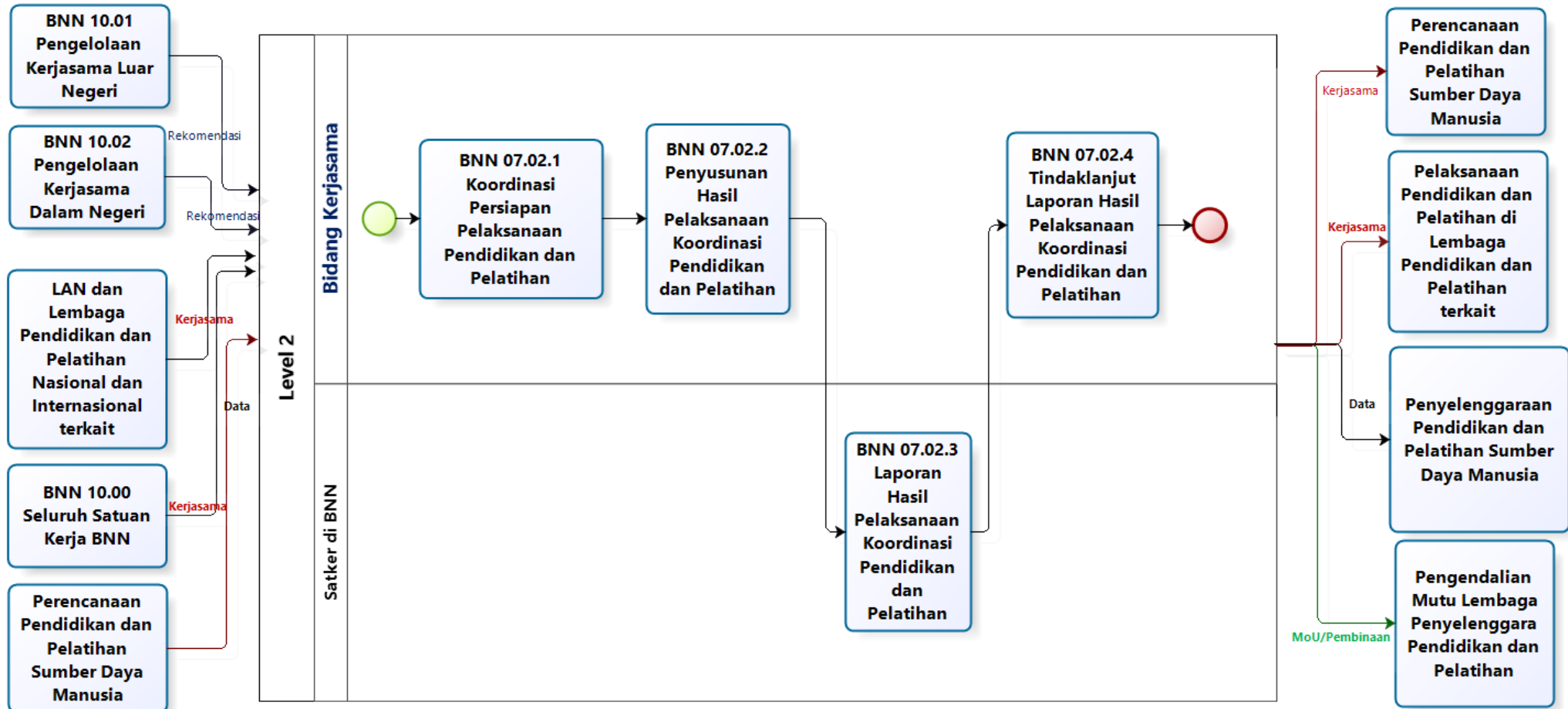
Gambar 39. Proses 06.03 Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia



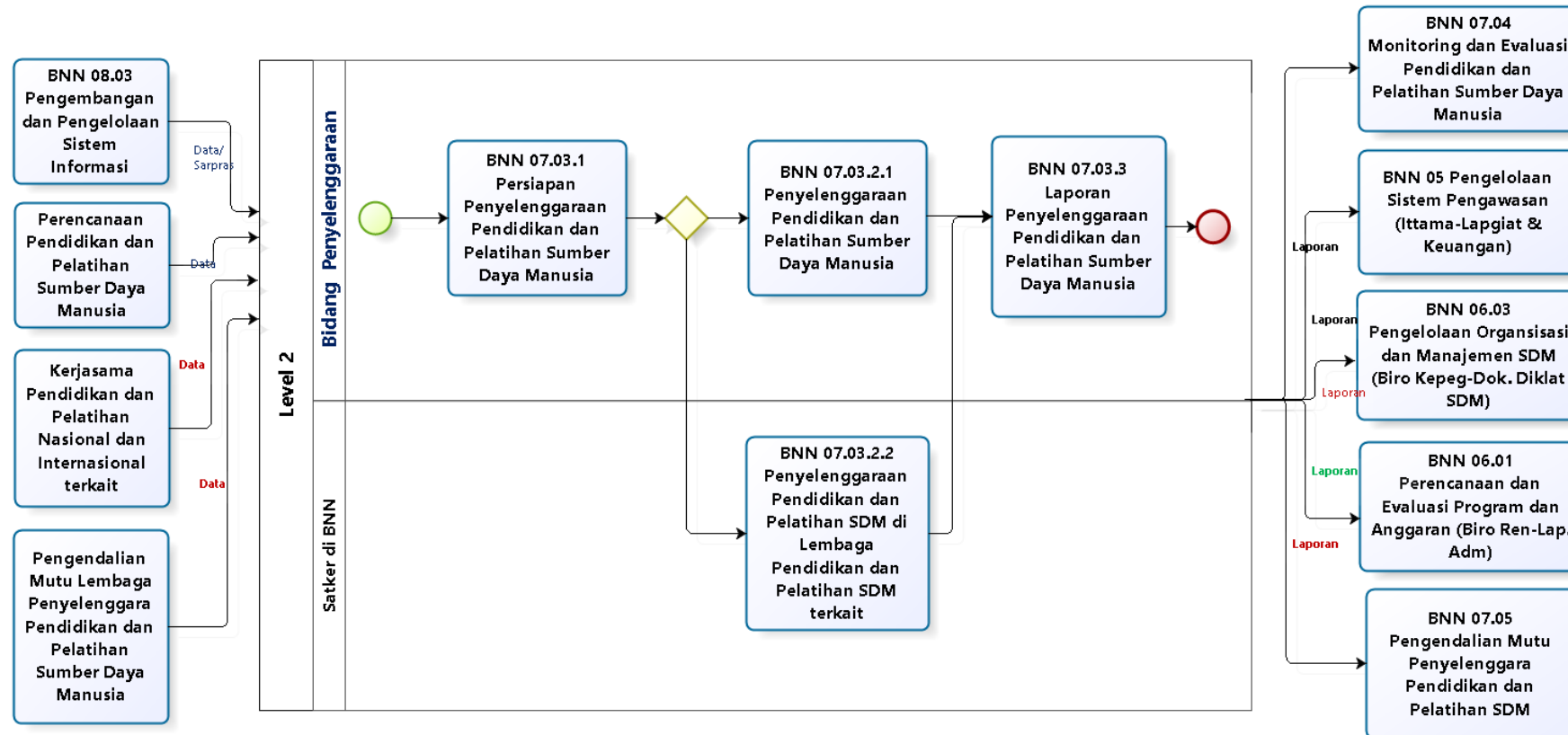
Gambar 40. BNN 06.04 Pengelolaan Administrasi Umum



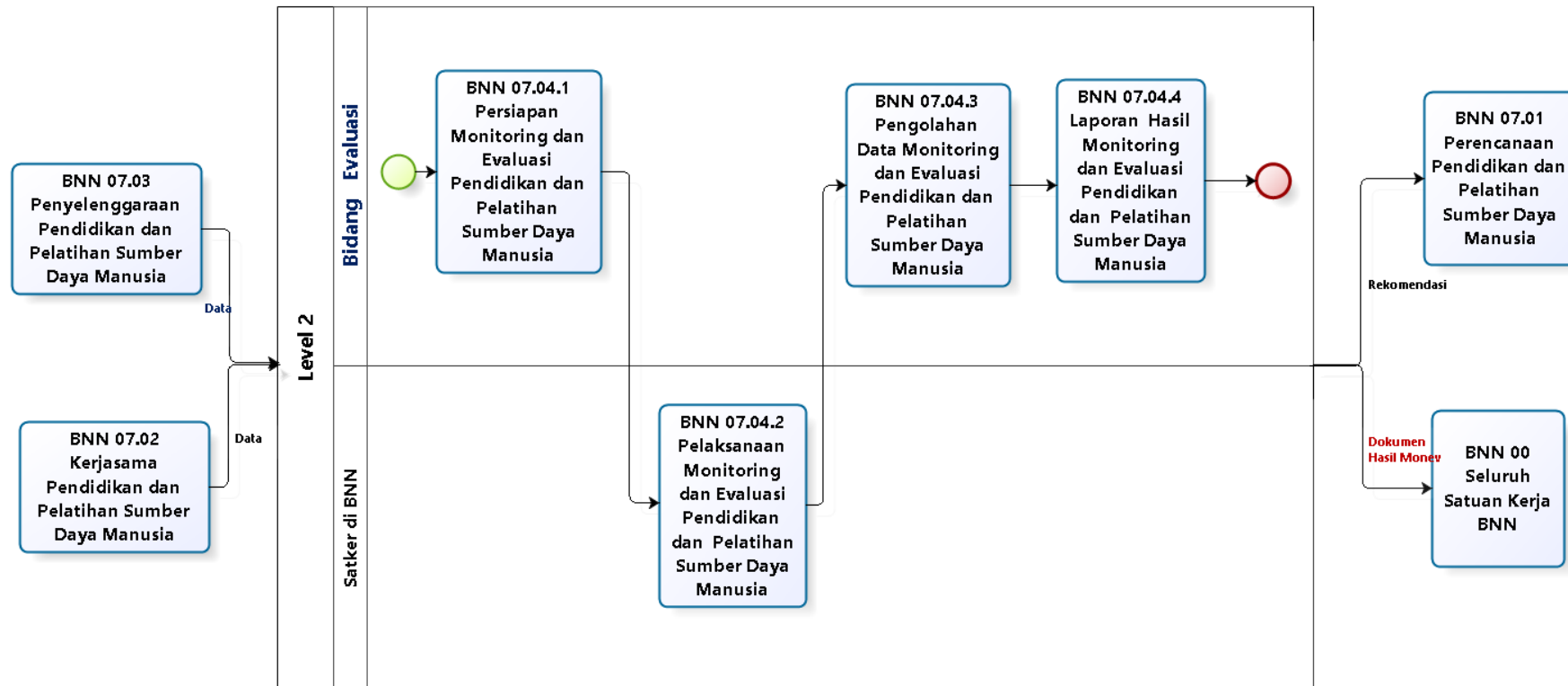
Gambar 41. BNN.07.01 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia



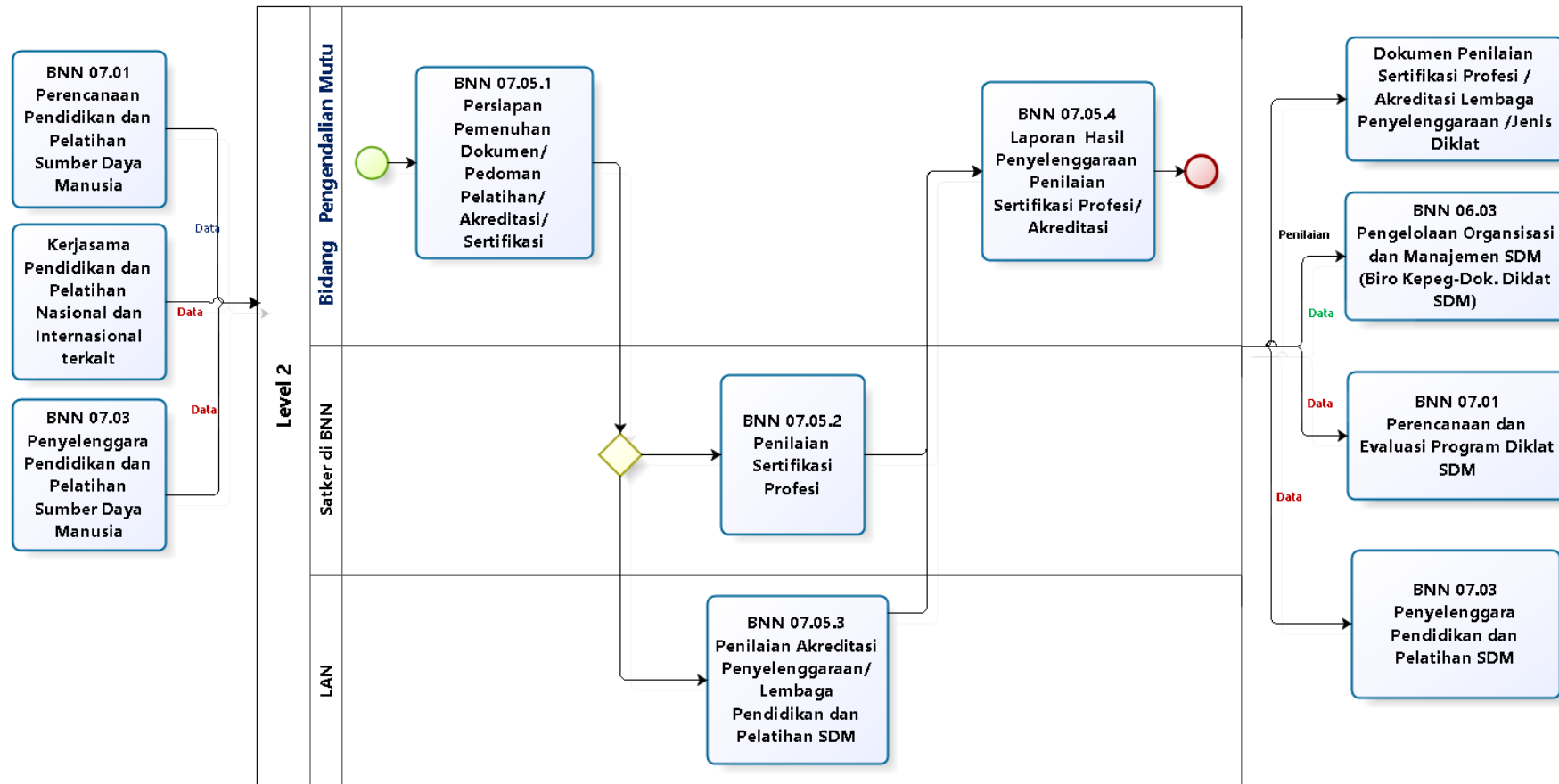
Gambar 42. BNN.07.02 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia



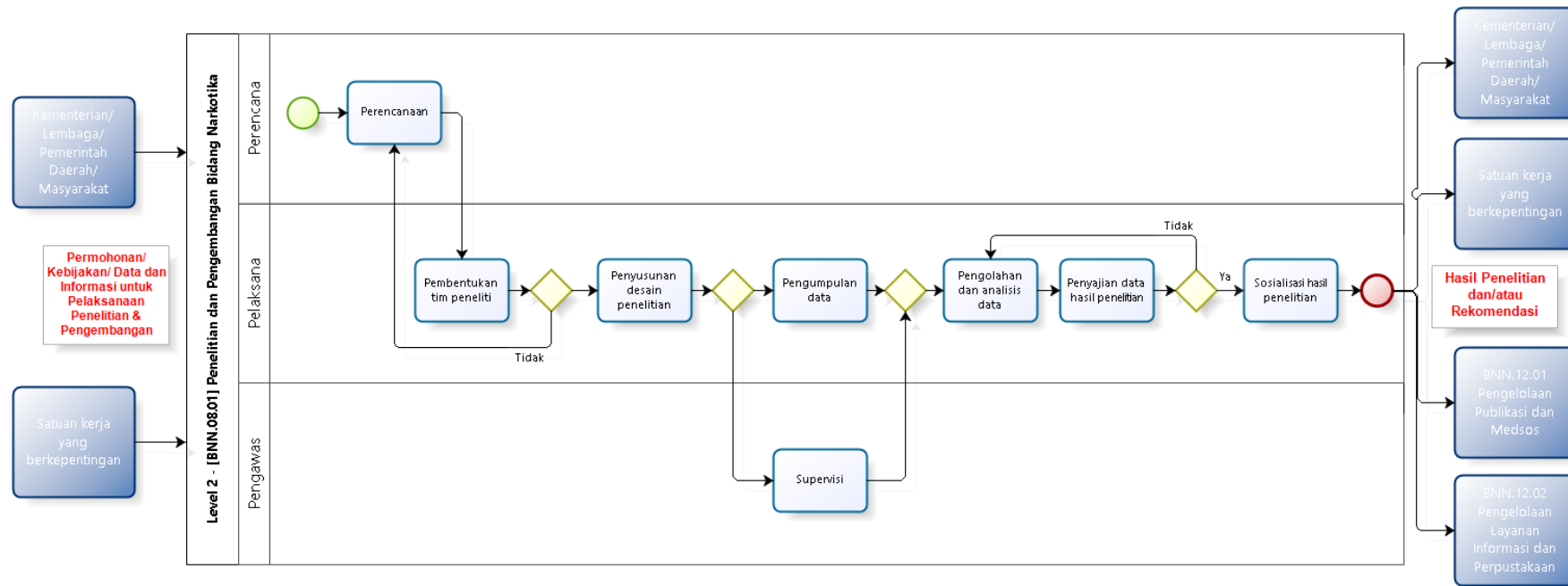
Gambar 43. BNN.07.03 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia



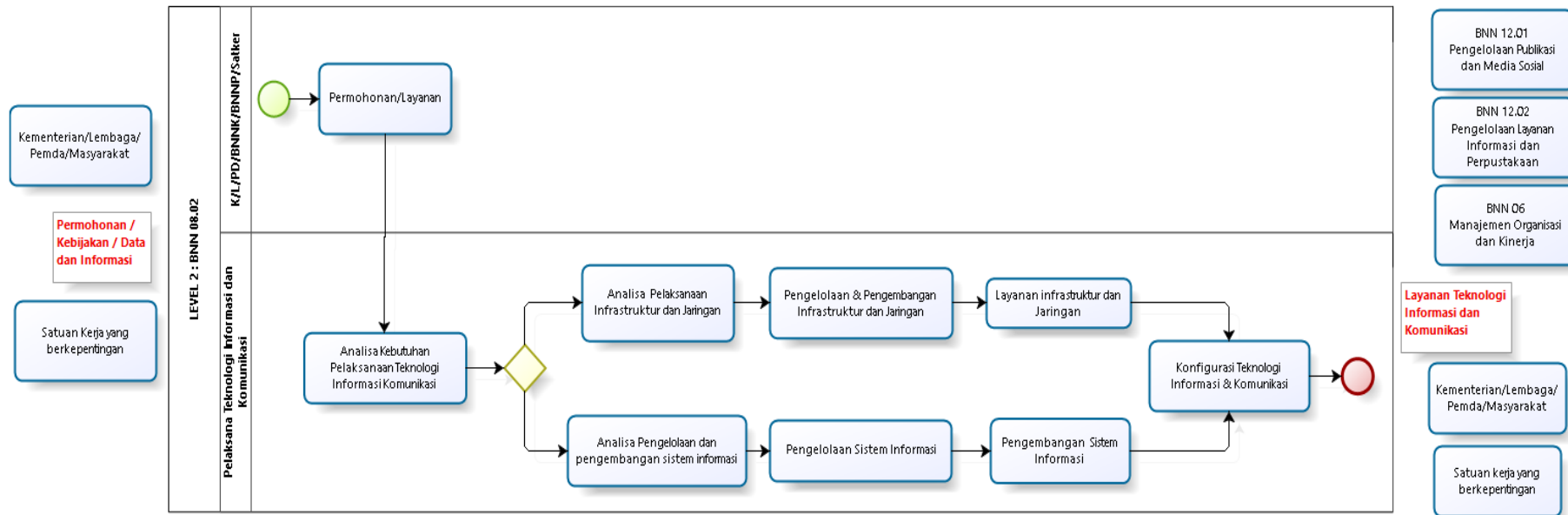
Gambar 44. BNN.07.04 Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia



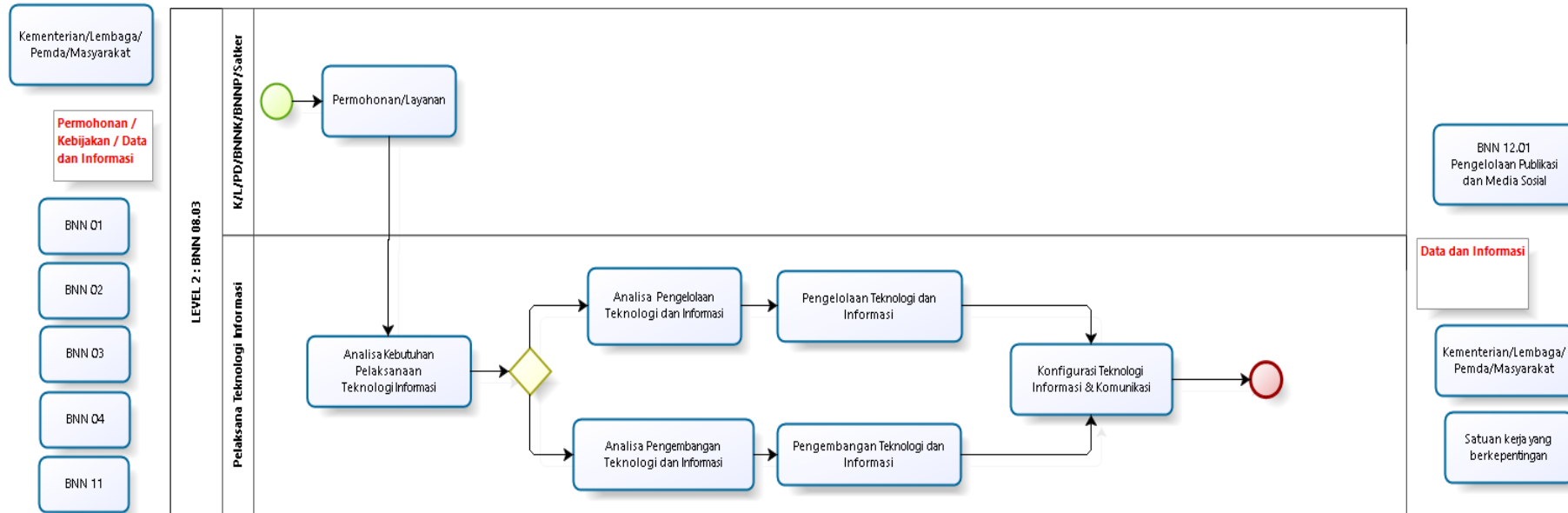
Gambar 45. BNN.07.05 Pengendalian Mutu Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan



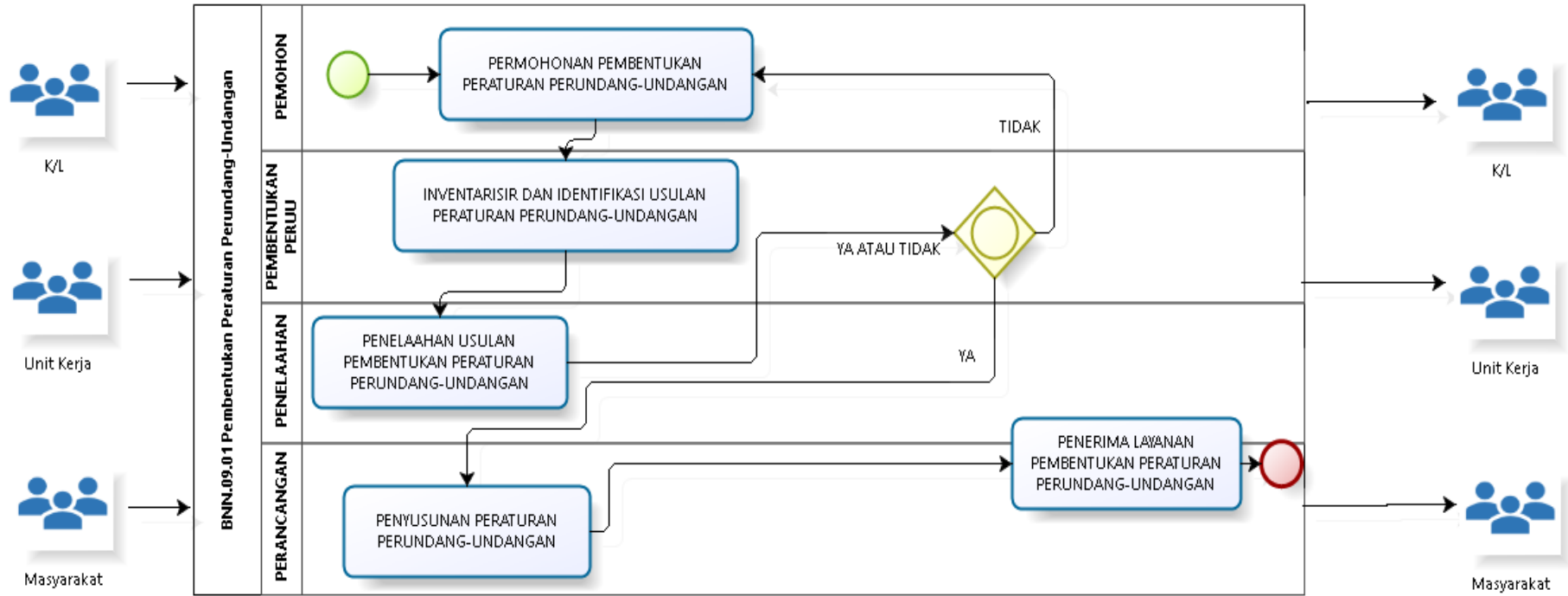
Gambar 46. BNN.08.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Narkotika



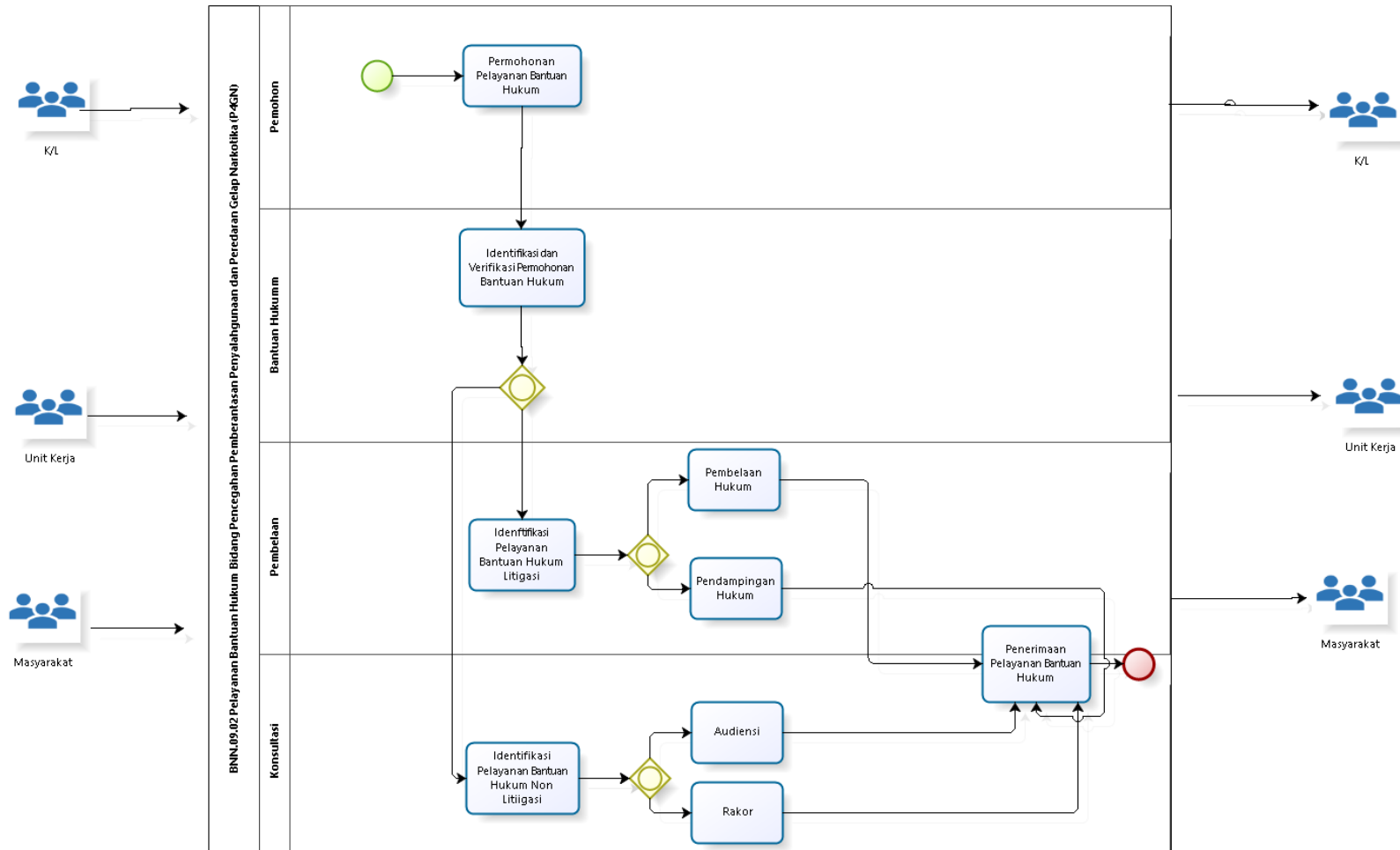
Gambar 47. BNN.08.02 Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi



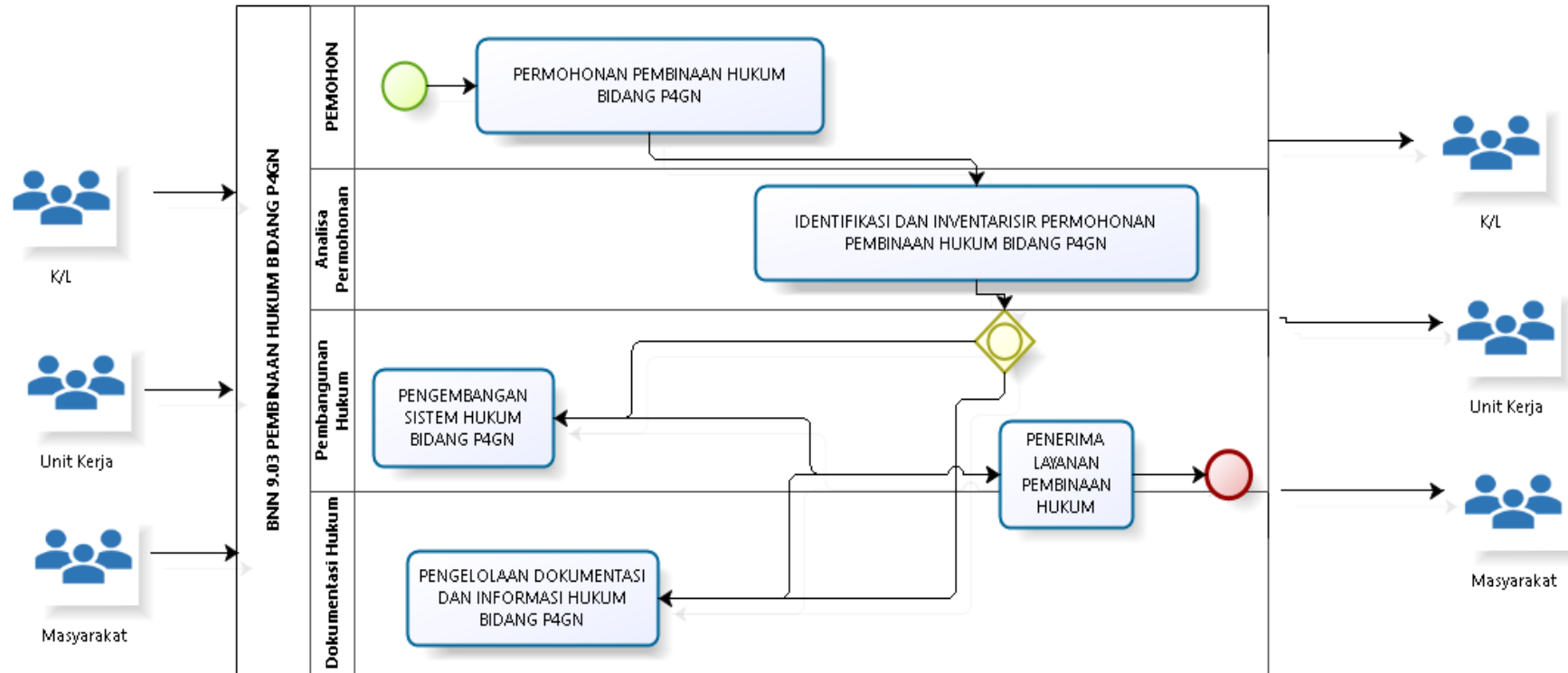
Gambar 48. BNN.08.03 Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi P4GN



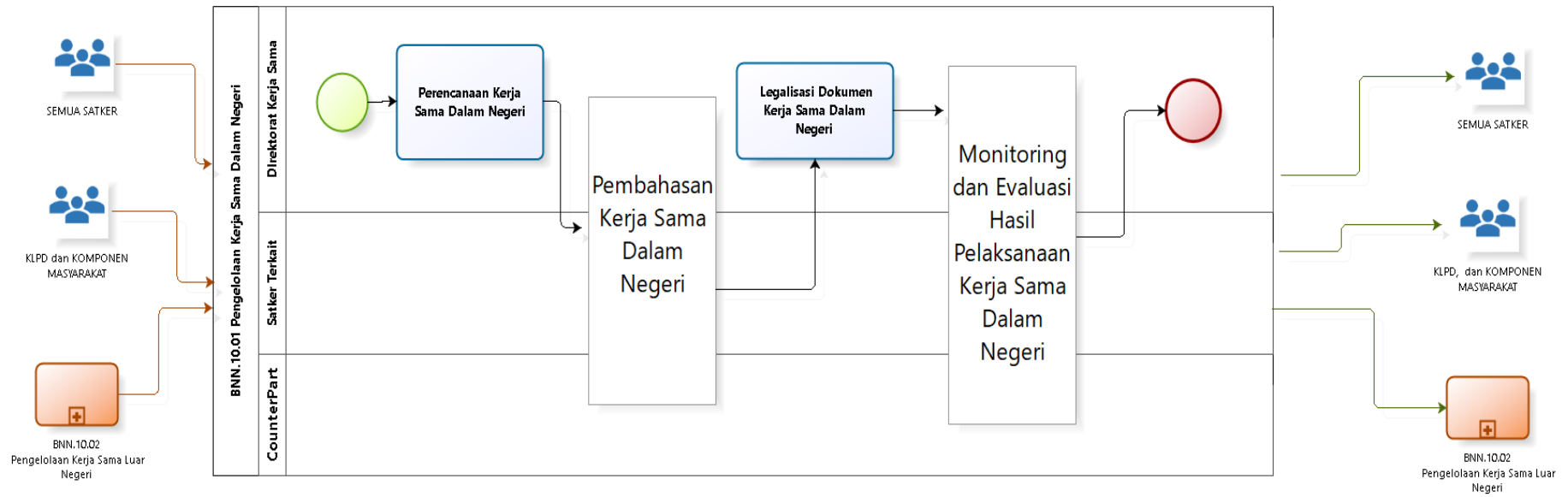
Gambar 49. BNN.09.01 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



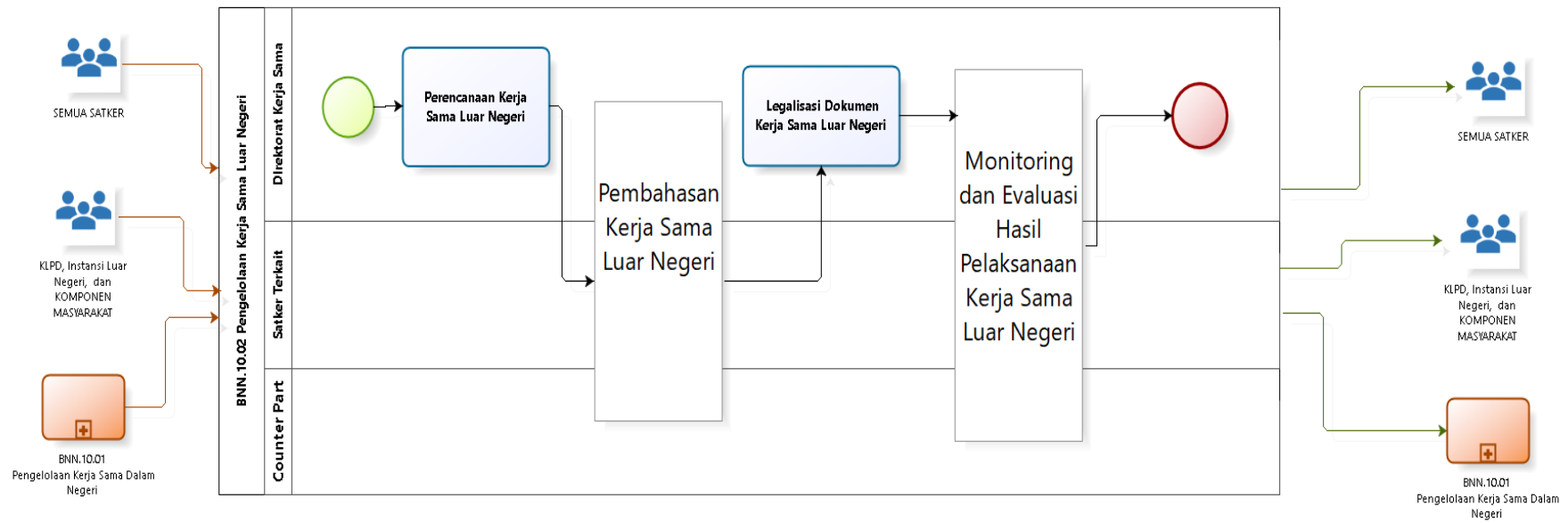
Gambar 50. BNN.09.02 Pelayanan Bantuan Hukum Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)



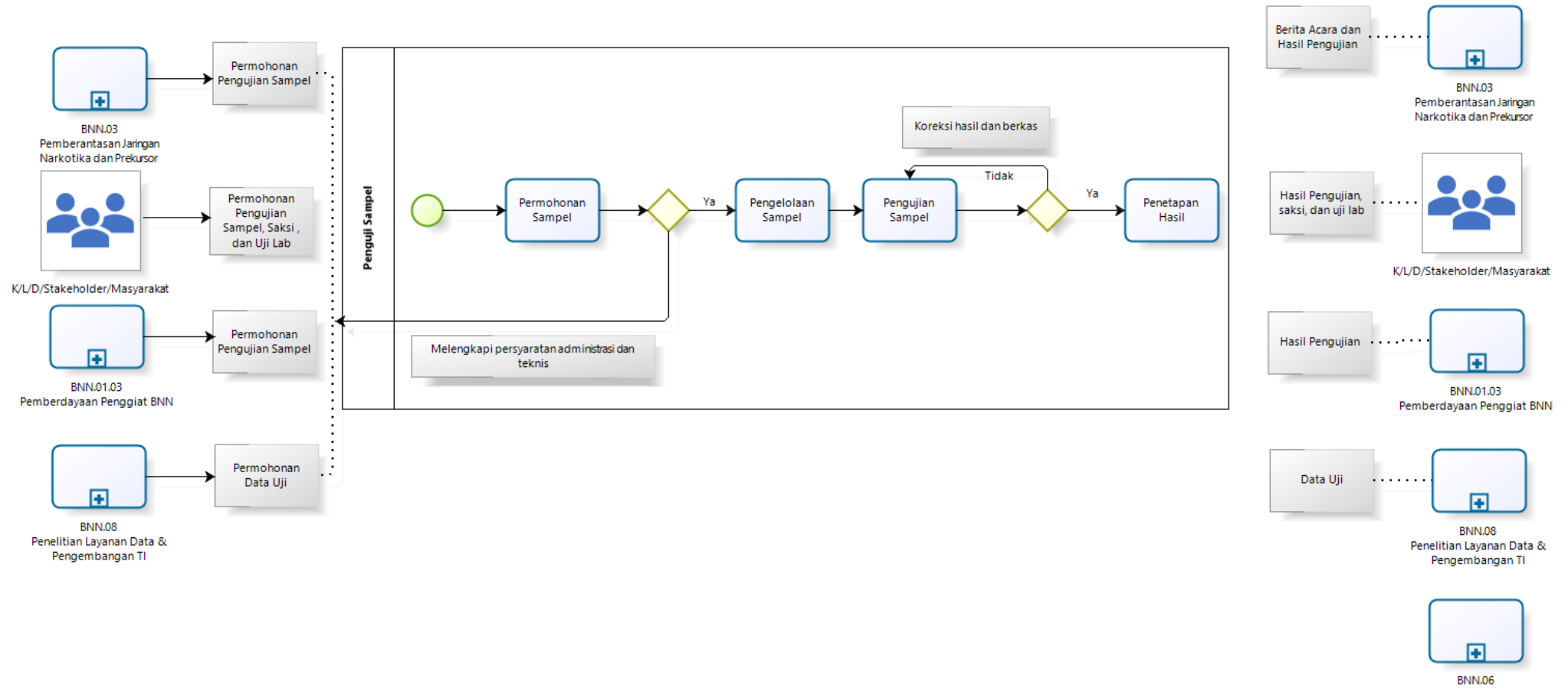
Gambar 51. BNN.09.03 Pembinaan Hukum Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)



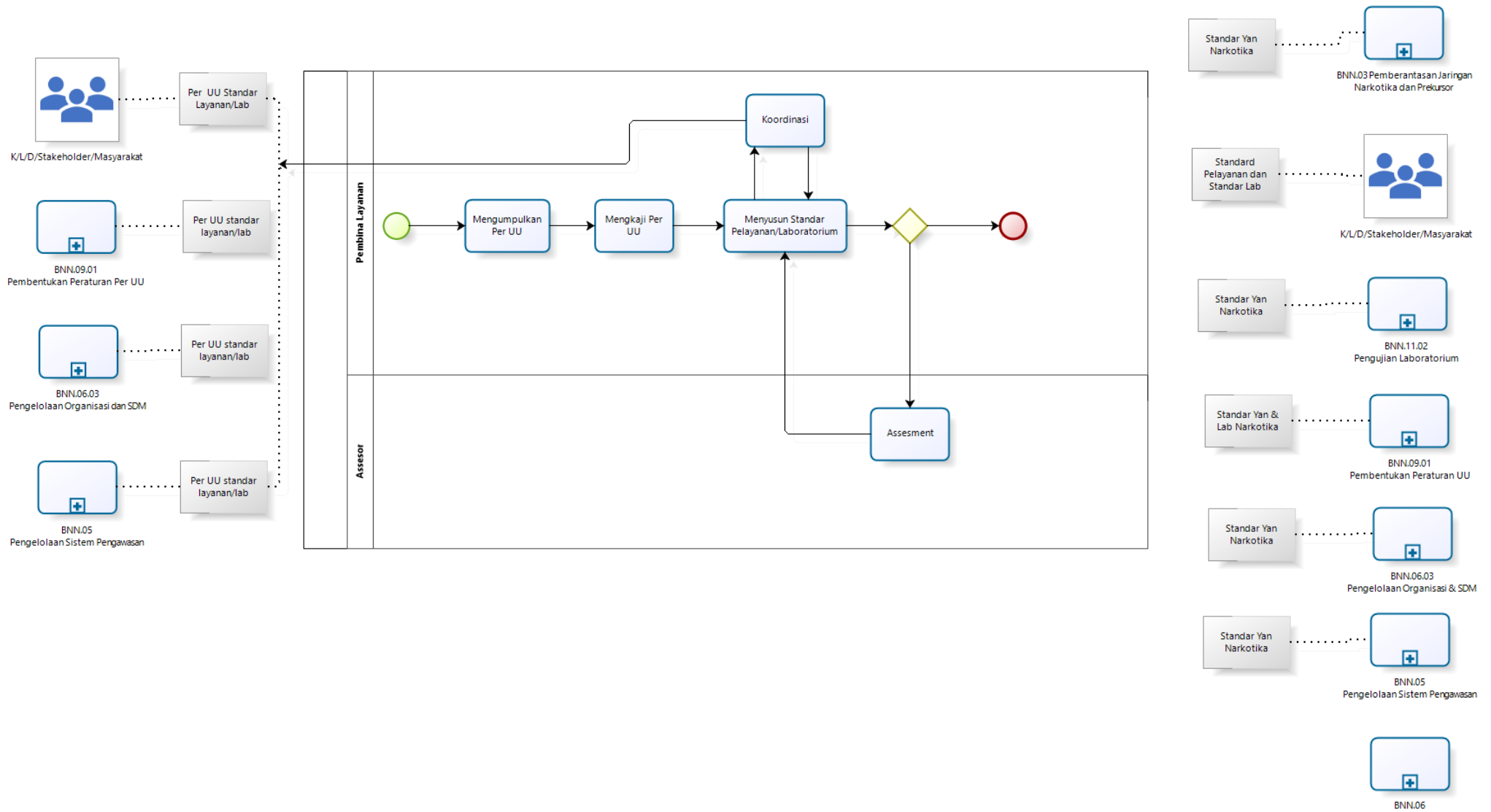
Gambar 52. BNN.10.01 Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri



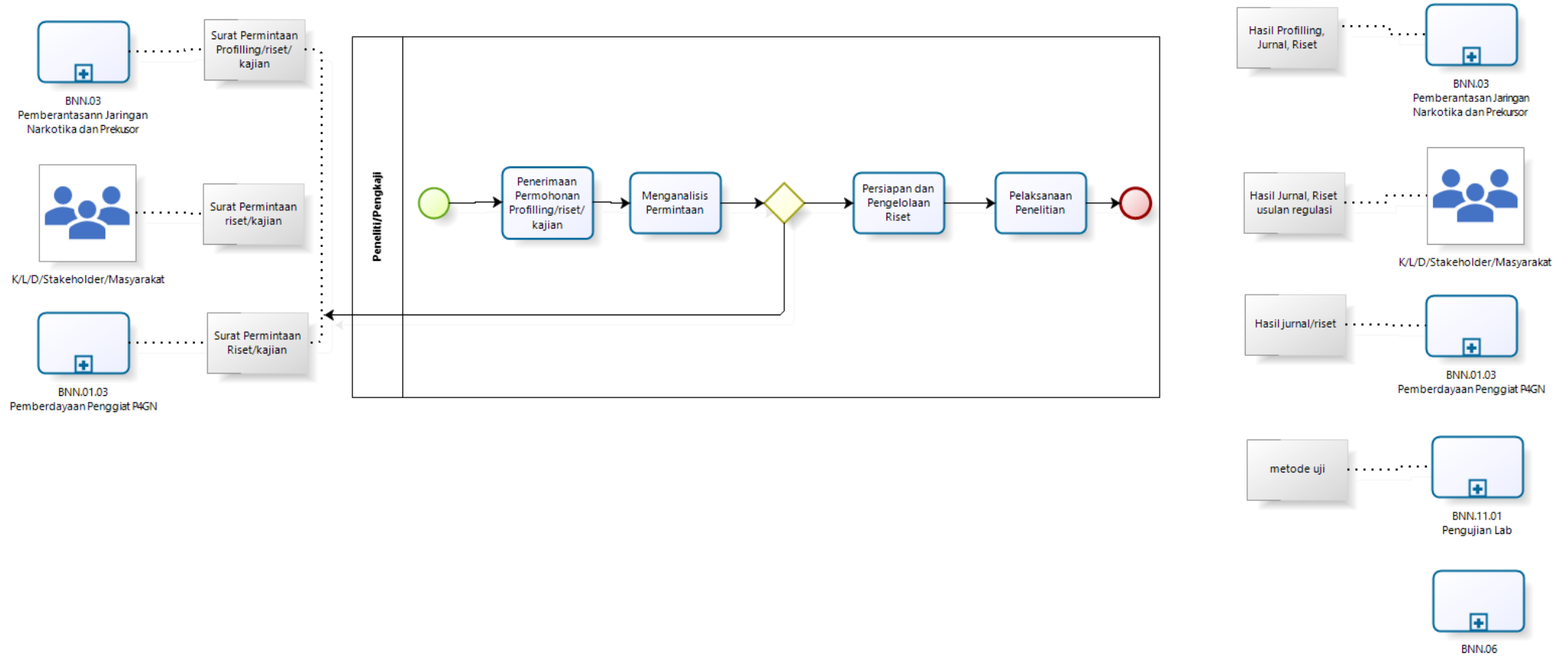
Gambar 53. BNN.10.02 Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri



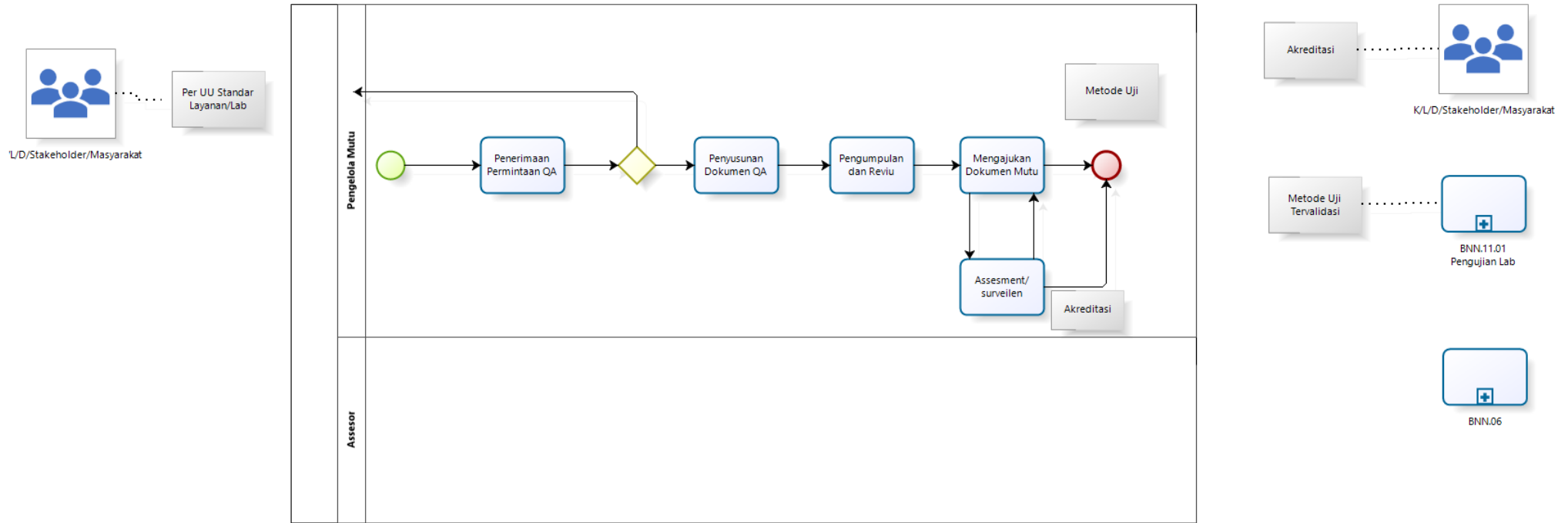
Gambar 54. BNN.11.01 Pelayanan Pengujian Laboratorium



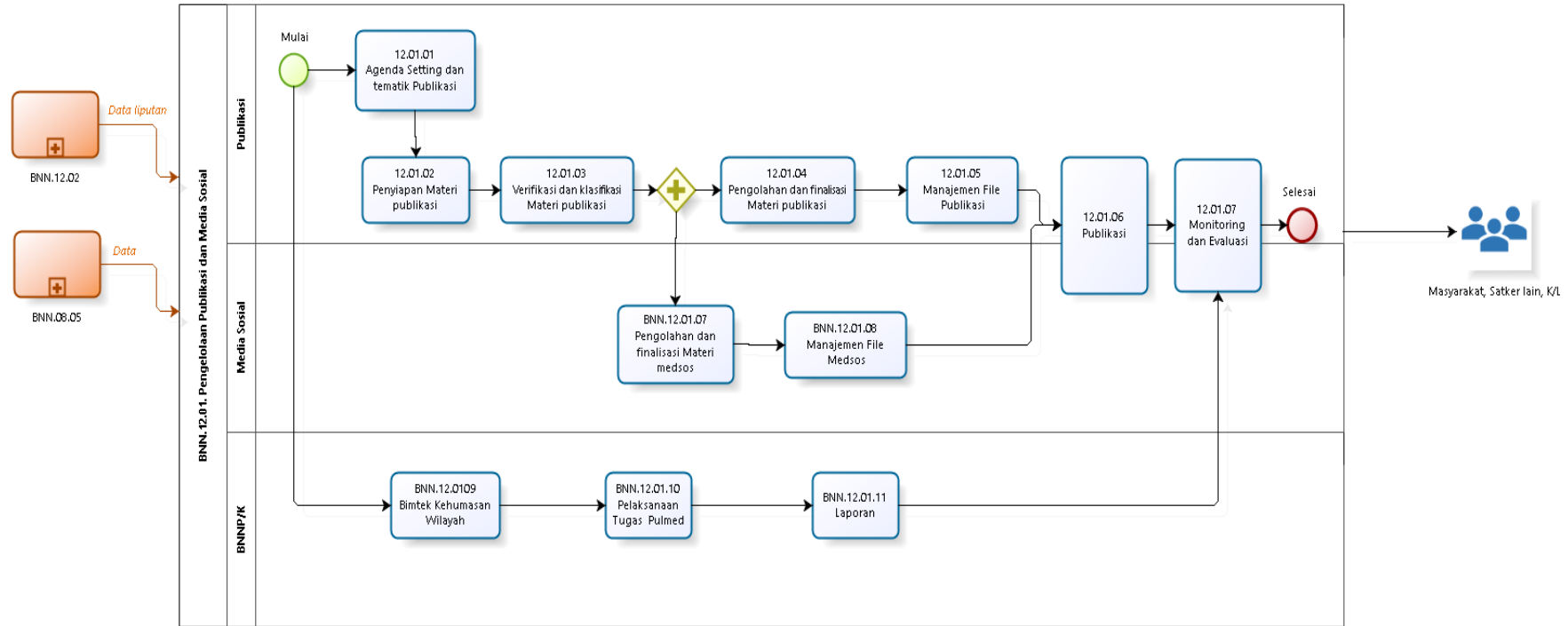
Gambar 55. BNN.11.02 Pembinaan Layanan Laboratorium



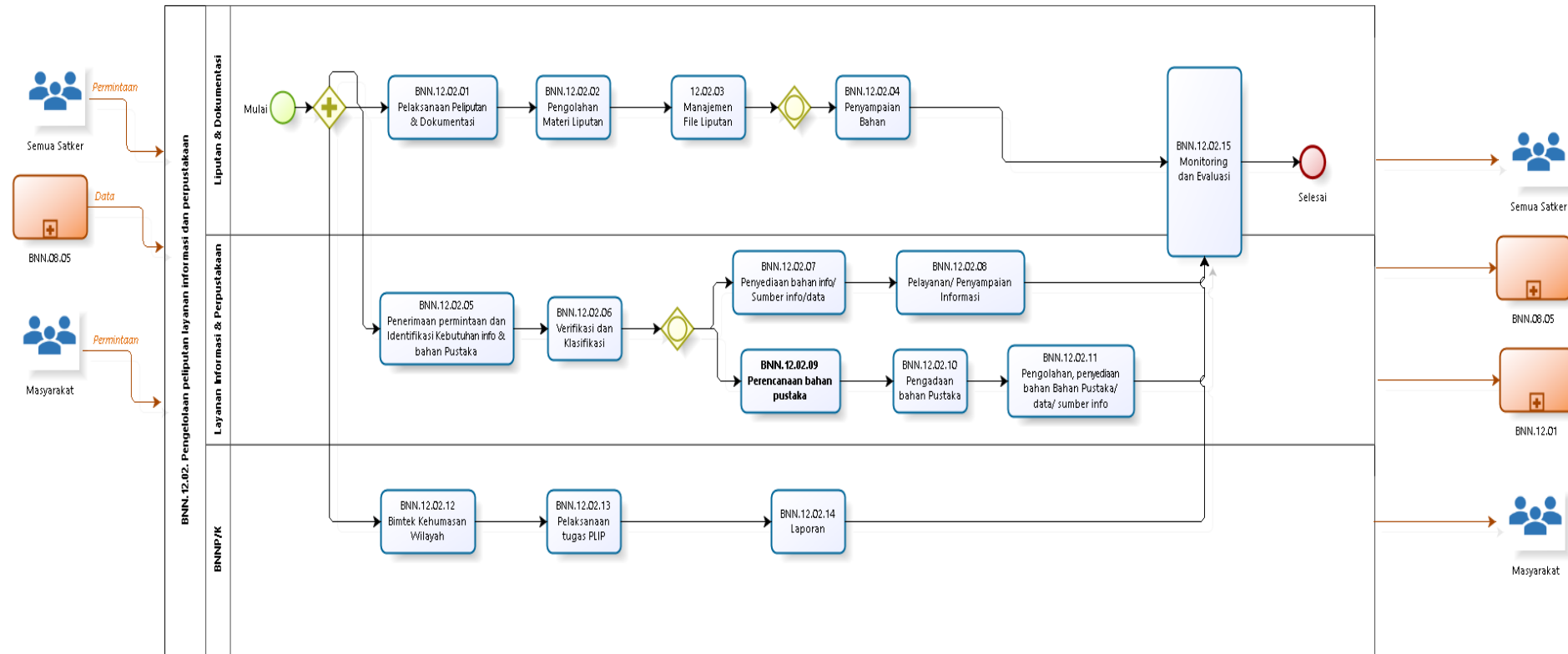
Gambar 56. BNN.11.03 Riset Laboratorium



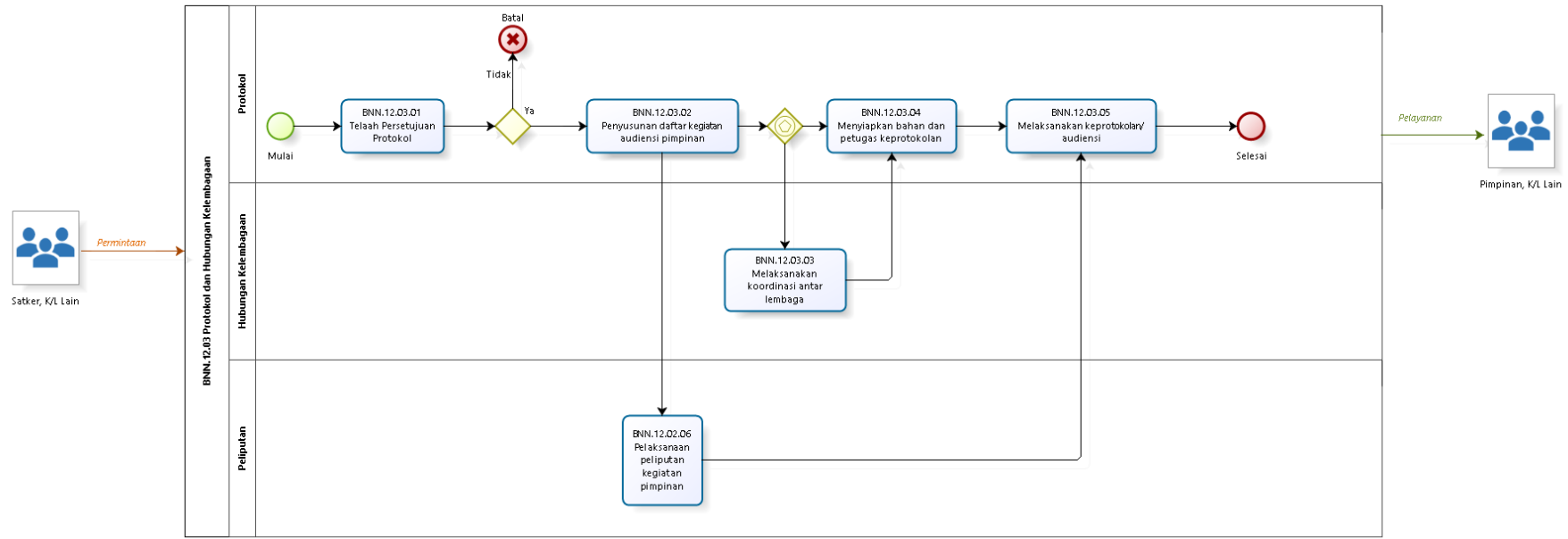
Gambar 57. BNN.11.04 Mutu Laboratorium



Gambar 58. BNN.12.01 Pengelolaan Publikasi dan Media Sosial



Gambar 59. BNN.12.02 Pengelolaan Peliputan Layanan Informasi dan Perpustakaan



Gambar 60. BNN.12.03 Protokol & Hubungan Kelembagaan

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

